



RENCANA STRATEGIS 2025-2029 **PERUBAHAN** DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG



Jl. Wastukencana No.2 Bandung
Tlp.022-4234892,email diskominfo@bandung.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025–2029** dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik di Kota Bandung.

Rencana Strategis Perubahan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029**. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin transparan, efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung perlu terus memperkuat penyelenggaraan **Pemerintah Digital** melalui integrasi layanan dan sistem pemerintahan, penguatan tata kelola data, peningkatan keamanan informasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem digital, serta peningkatan kualitas komunikasi publik. Transformasi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan layanan pemerintahan yang berbasis teknologi, tetapi juga mampu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Perubahan ini menjadi instrumen untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2025–2029. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah sehingga setiap

program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan ini tentunya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, maupun masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi semakin penting dalam membangun ekosistem digital Kota Bandung yang inklusif, aman, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Perubahan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Akhirnya, kami berharap **Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025–2029** dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin **terintegrasi, transparan, responsif, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat**, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Bandung yang semakin maju, nyaman, dan berdaya saing.

Bandung, 13 Agustus 2026

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung



Henryco Arie Sapiie, SE.AK
Nip. 197106211998061001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	8
Lampiran-Lampiran	132
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	14
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	18
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	50
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah	52
2.1.6 Dukungan BUMD	53
2.1.7 Kerjasama Daerah	53
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	
2.2.1 Permasalahan	54



2.2.2 Isu Strategis	58
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	67
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	68
3.3 Analisis Lingkungan Strategis (Analisis SWOT)	73
3.4 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	76
3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	77
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	80
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	123
BAB V PENUTUP.....	130

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1	
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	23
Tabel 2.2	
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Akhir	24
Tabel 2.3	
Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Diskominfo Berdasarkan Jabatan	25
Tabel 2.4	
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin	27
Tabel 2.5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Sebelum Perubahan	29
Tabel 2.6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	35
Tabel 2.7	
Realisasi Pelayanan Kinerja Diskominfo	48
Tabel 2.8	
Realisasi Keuangan Diskominfo	49
Tabel 2.9	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	56
Tabel 2.10	
Isu Strategis dalam Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian di Kota Bandung	64
Tabel 2.11	
Teknik Menyimpulkan Isu Statagetis Perangkat Daerah	65
Tabel 3.3	
Teknik Merumuskan Tujuan Sasaran Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 Sebelum Perubahan	69
Tabel 3.4	

Teknik Merumuskan Tujuan Sasaran Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 Setelah Perubahan	70
Tabel 3.5	
Penahapan Renstra Perangkat Daerah	71
Tabel 3.6	
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Diskominfo Sebelum Perubahan	78
Tabel 3.7	
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Diskominfo Sebelum Perubahan	79
Tabel 4.1	
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Sebelum Perubahan	84
Tabel 4.2	
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Setelah Perubahan	89
Tabel 4.3	
Rencana Program, Kegiatan,Subkegiatan dan Pendanaan Sebelum Perubahan	95
Tabel 4.4	
Rencana Program, Kegiatan,Subkegiatan dan Pendanaan Setelah Perubahan	108
Tabel 4.5	
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Saerah	121
Tabel 4.6	
Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kota Bandung 2025-2030 Sebelum Perubahan	124
Tabel 4.7	
Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kota Bandung 2025-2030 Setelah Perubahan	125
Tabel 4.8	
Indikator Kinerja Kunci Sebelum Perubahan	126
Tabel 4.9	
Indikator Kinerja Kunci Setelah Perubahan	128

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1	
Berdasarkan Eselonering	21
Gambar 2.2	
Berdasarkan Pendidikan Terakhir	24
Gambar 3.1	
Konsep Renstra Perangkat Daerah	68
Gambar 3.2	
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	68
Gambar 4.1	
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Diskominfo	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah kurang lebih 17.000 Ha, dihuni sebanyak 2.591.763 berdasarkan data pada Tahun 2024. Begitu banyaknya peranan dan julukan Kota Bandung selain Ibu Kota Provinsi, juga sebagai Kota Pendidikan, Kota Jasa, Kota Pariwisata, Kota Seni dan Budaya serta berbagai peranan dan julukan lainnya yang diemban oleh Kota Bandung sehingga Kota Bandung sarat dengan berbagai permasalahan kota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, baik dari segi layanan pemerintahan maupun layanan umum lainnya.

Pemerintah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat saat ini, telah memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk menunjang pelayanan publik dengan mengembangkan e-government agar informasi dan layanan publik dan pemerintahan dapat secara mudah diakses secara online. Beberapa capaian selama ini telah dihasilkan, namun terdapat beberapa permasalahan /kendala dan tantangan yang harus dihadapi, sehingga perlu merencanakan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan informasi di Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selalu berupaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensinya program dan meningkatkan eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang cepat

dengan persaingan global yang sangat ketat, oleh karena itu perlu selalu dilakukan menciptakan birokrasi yang kuat, efektif dan berdaya teknologi tinggi. Perencanaan Strategis (Renstra) menjadi kebutuhan nyata bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian di era digital ini sangatlah penting, kehadirannya dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga bervisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kota Bandung juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK kota juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi kedua Pemerintah

Kota Bandung yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.

Paradigma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi. Keterbukaan yang ditunjang oleh perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Disisi pemerintah sendiri, suatu perubahan terjadi disaat mulai dicanangkannya sistem desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap pemerintah daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal yang tidak lagi disamaratakan secara nasional.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan

sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tangan lainnya.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi dan informatika sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi dan informatika yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis Smart City dan semula Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini beralih ke Pemerintah Digital (Pemdi) dan telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan Smart City dan SPBE/Pemdi tidak sekedar mengedapankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan melalui visinya **"MEWUJUDKAN**

KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL ”, sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025-2029.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan urusannya yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan itu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Inmendagri Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Amanat Inmendagri Nomor : 2 Tahun 2025, dari Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 ini dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada spek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif dan akuntabel, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025-2029 dilakukan

dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem dan sistem dinamik.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE;
7. Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
8. Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi);

9. Inmendagri Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 52 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang mendukung pelaksanaan tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Bandung

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:^[1]_{SEP}

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mulai tahun 2025 hingga tahun 2029;
2. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.
3. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam 3 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung (RPJMD 2025-2029).

4. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
6. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, adapun sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5 Mitra PD

2.1.6 Dukungan BUMD

2.1.7 Kerjasama Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Analisis Lingkungan Strategis (Analisis SWOT)

3.4 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menjalankan tugas pokok, yaitu; berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mempunyai tugas pokok berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas tersebut, yaitu;

A. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik;
2. Pelaksanan kebijakan lingkup, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika, Persandian dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika, persandian dan statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut;

1. Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, Program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. Merumuskan kebijakan lingkup komunikasi dan informasi, persandian dan statistik;
4. Menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
5. Menyelenggarakan pengelolaan aplikasi informatika;
6. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi;
7. Menyelenggarakan statistik sektoral;
8. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
9. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja daerah yang meliputi; LKPJ, LPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

B. Sekretaris, membawahi:

1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi :

Membawahi kelompok jabatan fungsional.

D. Bidang Infrastruktur TIK;

Membawahi kelompok jabatan fungsional.

E. Bidang Diseminasi Informasi;

Membawahi kelompok jabatan fungsional.

F. Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi;

Membawahi kelompok jabatan fungsional.

G. Bidang Data dan Statistik;

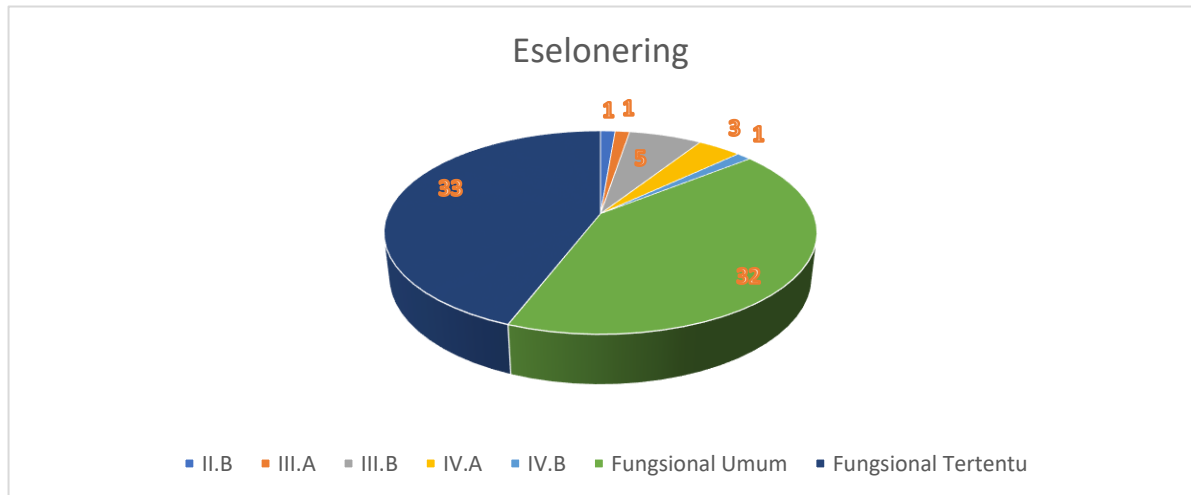
Membawahi kelompok jabatan fungsional.

H. UPT Radio Sonata

Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.

Gambar 1. Gambar Eselonering Pagawai Diskominfo

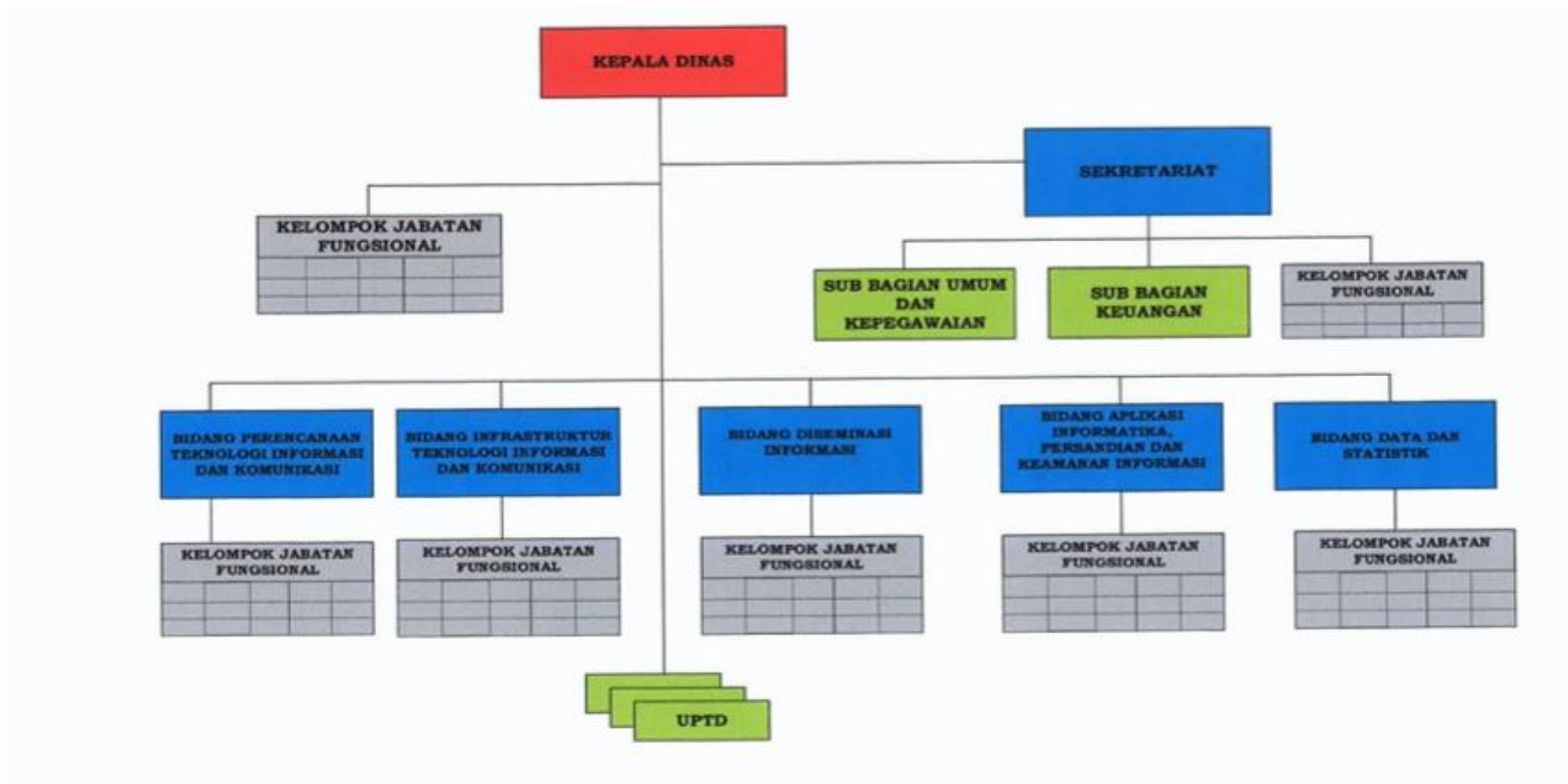


❖ Jumlah Personil Susunan

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 memiliki jumlah sebanyak 77 orang PNS, terdiri dari;

- Eselon II b sebanyak 1 orang;
- Eselon III a sebanyak 1 orang;
- Eselon III b sebanyak 5 orang;
- Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 18 orang dan Ka Bagian Tata Usaha UPT (Eselon VI b) sebanyak 1 orang, fungsional umum 33 orang serta fungsional tertentu sebanyak 15 orang.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimiliki mencakup;

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 77 orang dengan 69 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dari jumlah pegawai sebanyak 77 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 5 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 18 orang dan Ka Bagian Tata Usaha UPT (Eselon VI b) sebanyak 1 orang, fungsional umum 32 orang serta fungsional tertentu sebanyak 34 orang.

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Eselon	Jumlah	Persentase
II.b	1	1%
III.a	1	1%
III.b	5	7%
IV.a	3	4%
IV.b	1	1%
Fungsional Umum	32	42%
Fungsional Tertentu	34	44%

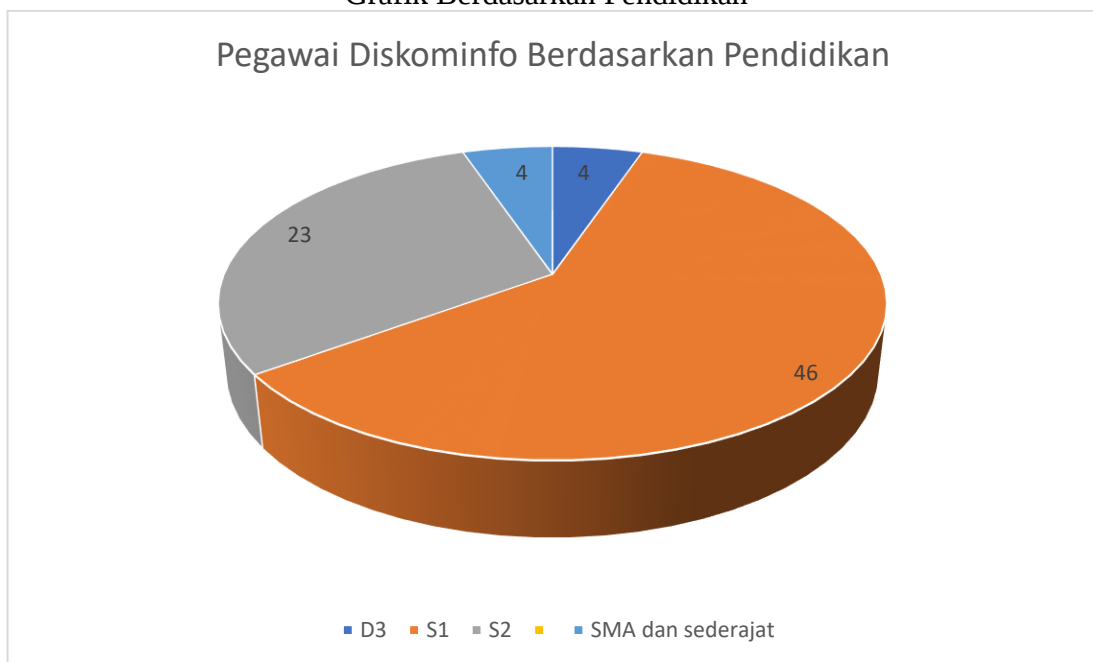
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan yang dimiliki, dapat di lihat Tabel 1.2.

Tabel 2.2**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

Pendidikan Akhir	Jumlah	Persentase
SLTA	4	5%
D3	4	5%
S1	47	60%
S2	23	30%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 2.2
Grafik Berdasarkan Pendidikan

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 23 orang (29%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 46 orang (56%), yang memiliki D3 sebanyak 5 orang (6%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 3 orang (4%),

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Diskominfo Kota Bandung untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kota Bandung.

Berdasarkan Kepwal No.800/Kep.1189-Bagor/2025 dan hasil analisa jabatan data pegawai di atas, ideal pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika seharusnya sebanyak 165 pegawai, sedangkan pegawai saat ini sebanyak 77 orang sehingga masih kekurangan pegawai sebanyak 88 orang. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini;

Tabel 2.3
Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Diskominfo
Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN JABATAN	Sesuai Kebutuhan Kepwal No.800/Kep.1189- Bagor/2025	Kondisi Saat ini	KURANG/LEBIH
1	Kepala	1	1	0
2	Pranata Komputer (Madya)	5		-5
3	Sandiman (Madya)	1		-1
4	Manggala Informatika (Madya)	2		-2
5	Sekretaris	1	1	0
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
	Arsiparis (Terampil)	1	1	0
	Arsiparis (Mahir)	1		-1
	Arsiparsi (Pertama)	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	-1
	Pengolah Data dan Informasi	2	1	-1
	Pengolah Administrasi	2	1	-1



7	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	-1
	Pengolah data dan informasi	4	2	-2
8	Perencana Muda	1		-1
	Perencana Pertama	1		-1
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	-1
	Pengolah data dan informasi	1		-1
9	Kepala Bidang Perencanaan TIK	1	1	0
	Pranata Komputer (Muda)	4	3	-1
	Pranata Komputer (Pertama)	3	2	-1
	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Komunikasi	3	5	2
	Pengolah data dan informasi	4	3	-1
10	Kepala Bidang Infrastruktur TIK	1		-1
	Pranata Komputer (Muda)	4	3	-1
	Pranata Komputer (Pertama)	5	5	0
	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Komunikasi	6	2	-4
	Pengolah data dan informasi	4	4	0
11	Kepala Bidang Diseminasi Informasi	1	1	0
	Pranata Hubungan Masyarakat (Muda)	3	3	0
	Pranata Hubungan Masyarakat (Pertama)	4	4	0
	Pranata Hubungan Masyarakat (Penyelia)	1		-1
	Pranata Hubungan Masyarakat (Mahir)	1		-1
	Pranata Hubungan Masyarakat (Terampil)	6		-6
	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Komunikasi	2		-2
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
	Pengolah data dan informasi	3	1	-2
12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi	1	1	0
	Pranata Komputer (Muda)	8	5	-3
	Pranata Komputer (Pertama)	8	5	-3
	Sandiman (Muda)	2	1	-1
	Sandiman (Pertama)	4		-4
	Manggala Informatika (Muda)	2		-2
	Manggala Informatika (Pertama)	3		-3
	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Komunikasi	3		-3
	Pengolah data dan informasi	2		-2
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
13	Kepala Bidang Data dan Statistik	1	1	0
	Statisi Muda	3	3	0

	Statisi Pertama	3	3	0
	Pranata Komputer (Muda)	2		-2
	Pranata Komputer (Pertama)	4	1	-3
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	-2
	Pengolah data dan informasi	2		-2
14	Ka.UPT Radio	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2		-2
	Pengelola Siaran	14		-14
	Pengelola Layanan Operasional	2		-2
15	Ka. Subbag. TU UPT.Radio	1	1	0
	Pengolah Data	1		-1
	Pengadministrasi Perkantoran	1		-1
	JUMLAH	165	77	-88

* KETERANGAN

	Belum Terisi
	Kelebihan

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Sumber daya sarana dan prasarana.

Penunjang lainnya berupa aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan informatika (komputer, kendaraan bermotor roda dua dan empat dan lain-lain), dapat dilihat pada tabel 2.4, di bawah ini;

Tabel 2.4
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan dinas dan jabatan	26
2	Alat Kantor dan rumah (meja, kursi, lemari dll)	396
3	Alat studio dan alat komunikasi (kamera, proyektor, telephon dll)	58
4	Alat-alat lainnya (CCTV, generator set dll)	166
	JUMLAH	646

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, mengacu pada RPJMD Kota Bandung 2025-2029 dan Indikator Kinerja Kunci, untuk melihat capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini;



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Mencapai indeks SPBE yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sejalan dengan rencana strategis SPBE nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018.	Permendagri No. 86 Tahun 2017		3,25	3,30	3,35	3,50	4,62	3,19	3,61	3,98	4,59	4,66	125,59%	98,16%	109,09%	118,81%	100,87%
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka		Komunikasi dan Informatika		55%	65%	75%	100%	NA	55,12%	63,25	75%	100%	NA	100,52%	100%	97,31%	100%	NA



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Jumlah perangk daerah yang menggunakan persandian yang terkendali		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelomp k Informas i Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	Jumlah KIM/Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab/kota x 100%	78,12%	93,75%	100%	100%	100%	78,12 %	89,06	100%	100%	100%	100%	100%	95,00 %	100 %	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat		Statistik		82	85	88,31	88,40	95,90	85,19	85,53	91,07	95,89	96,05	107,24%	104%	100,62%	103,13	108,47
5	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi		Tersedia nya sistem data dan statistik yang terintegrasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%
6	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat		Data Basis Pembangunan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Cakupan layanan informasi masyarakat		Persandian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,19%	-	-	-	-
8	Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan		Prosentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	Jumlah perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah 100% jumlah total Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,28%	-	-	-	-
9	Website Milik Pemerintah Kota Bandung				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	NA	NA	Ada	Ada	100%	100%	100%	100 %	100%
12	Persentase data informasi yang berkualitas				55	65	75	-	-	55,12	65,02	75,35	-	-	100,52 %	100%	100,3 %	100,47 %	-
13	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,50 %	-	-	-	-
14	Cakupan persentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman				100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100	100%	100%	100%	100 %	100%
15	Layanan pengaduan masyarakat secara online (Lapor)				-	-	-	-	-	558	701	697	953	953	-	-	-	-	-



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
16	Server Pemerintah Kota Bandung yang dikelola				34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	100%	100%	100%	100%	100%
17	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				-	1	110	173	173	-	1	110	173	173	-	-	100%	100%	100%
18	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				-	-	40	93	93	-	-	40	93	93	-	-	-	100%	100%
19	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda				294	236	263	112	112	294	236	263	112	112	100%	100%	100%	100%	100%
20	Konten Foto				782	765	574	599	599	782	765	574	599	599	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
21	Konten				18	7	16	37	37	18	7	16	37	37	100%	100%	100%	100%	100%
22	Konten Grafis				792	2212	1735	2017	2017	792	2212	1735	2017	2017	100%	100%	100%	100%	100%
23	Konten Audio Video				1078	1609	2599	1908	1908	1078	1609	2599	1908	1908	100%	100%	100%	100%	100%
24	Siaran pers				NA	1281	1424	1630	1630	-	1281	1424	1630	1630	-	-	100%	100%	100%
25	Siaran pers yang dimuat di media				NA	23360	24528	-	-	-	23360	24528	-	-	-	-	100%	100%	-
26	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1	87	69	80	80	1	87	69	80	80	-	100%	100%	100%	100%
27	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
PENDAPATAN	2.400.000.000	2.400.000.000	2.481.700.000	-	-	587.880.000	3.072.765.000	1.647.145.000	-	-	24,50%	128,03 %	66,37%	-	-	2,23%	66,81%
Menara telekomunikasi	2.400.000.000	2.400.000.000	2.481.700.000	-	-	587.880.000	3.072.765.000	1.647.145.000	-	-	24,50%	128,03 %	66,37%	-	-	2,23%	66,81%
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai	-	-	-			-	-	-			-	-				-	93,53%
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai i	12.234.792.073	16.390.499.961	18.242.699.945	17.178.808.918	19.114.410.340	11.298.168.005	15.450.512.699	14.722.083.629	16.414.134.333	19.114.410.340	92,34%	94,27%	80,70	95,55	95,47	2,00%	74,43%
- Belanja barang dan jasa	31.529.611.746	27.722.293.020	28.059.117.437	20.208.205.114	23.859.882.649	28.049.830.542	26.069.394.115	27.563.025.853	19.666.274.491	23.859.882.649	88,96%	94,04%	98,23	97,32	98,82	3,67%	83,59%
- Belanja Hibah	-	-	-	25.000.000		-	-	-	25.000.000		-	-	-	100,00		-	
Belanja modal	1.656.724.705	3.256.697.242	1.339.413.716	4.091.445.954	8.247.779.253,50	1.388.183.019	2.885.342.613	1.334.051.348	4.058.001.160	8.171.280.894	83,79	94,39%	99,60	99,18	99,07	3,38%	77,97%
Total	45.421.128.524	47.369.490.223	47.641.231.098	41.503.459.986	52.414.775.675	40.736.181.566	44.599.053.873	43.619.160.830	40.163.409.984	51.145.573.883	89,69%	94,15	91,56	96,77	97,58	3,29%	85,86%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Data mikro Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung lainnya dalam mendukung layanan kinerja sesuai dengan tugas dan pokok, yaitu;

1. Bidang Perencanaan Teknologi dan Informatika

Transformasi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital.

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 2024 (RPJPN 2025-2045): Menetapkan transformasi digital sebagai penggerak utama menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi). Kebijakan ini memperbarui pendekatan evaluasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peta dan Rencana Arsitektur SPBE.

Transformasi digital pemerintahan memasuki tahap baru. Pemerintah tidak lagi cukup hanya memastikan tersedianya aplikasi, sistem informasi, infrastruktur, dan tata kelola teknologi. Fokus ke depan bergeser pada bagaimana seluruh ekosistem digital pemerintah mampu menghasilkan layanan publik yang terintegrasi, mudah diakses, aman, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sejalan dengan arah tersebut, pengukuran penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diarahkan untuk bertransformasi menjadi **Indeks Pemerintah Digital**. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama atau *rebranding*, melainkan perubahan paradigma dalam melihat keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Pemerintah Digital menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, adaptif, berorientasi pada pengguna, dan berbasis data.

Perubahan indeks ini juga mendorong terjadinya pergeseran orientasi dari digitalisasi proses menuju penciptaan dampak. Keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya aplikasi atau tingginya tingkat kematangan teknologi, tetapi oleh kemampuan pemerintah dalam menyederhanakan proses, mengintegrasikan data dan layanan, meningkatkan efisiensi, serta menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan demikian, Indeks Pemerintah Digital menjadi instrumen strategis untuk mengukur posisi dan kemajuan transformasi digital setiap instansi pemerintah. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan, menentukan prioritas perbaikan, melakukan *benchmarking* antarinstansi, dan mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dokumen rancangan pemerintah juga mengarahkan agar pengukuran semakin terpadu dan berbasis data, termasuk melalui mekanisme audit, validasi, dan pemanfaatan infrastruktur data pemerintah.

Pemerintah Digital membutuhkan dukungan yang kuat dari sisi kepemimpinan, regulasi, infrastruktur, data, teknologi, SDM, serta kolaborasi lintas instansi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama fragmentasi aplikasi dan data, rendahnya interoperabilitas, proses bisnis yang belum sederhana, kesenjangan kompetensi dan infrastruktur, serta risiko keamanan dan perlindungan data. Oleh karena itu, solusi Pemerintah Digital tidak cukup dilakukan melalui penambahan aplikasi, tetapi harus diarahkan pada integrasi ekosistem digital, penyederhanaan proses bisnis, penguatan interoperabilitas data, peningkatan kompetensi SDM, keamanan sejak awal, serta pengembangan layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan

demikian, keberhasilan Pemerintah Digital diukur bukan dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari seberapa besar transformasi digital mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan layanan publik yang lebih mudah, cepat, aman, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat

2. Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi;

a. Sadayana Bandung Super app.

Pemerintah Kota Bandung telah membangun berbagai sistem layanan digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik melalui platform digital yang lebih efisien, transparan, serta aman.

Saat ini Pemerintah Kota Bandung, melalui Diskominfo sedang merintis suatu platform aplikasi yang diproyeksikan akan mengintegrasikan berbagai layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu **Sadayana Bandung Superapp**.

Superapp merupakan platform terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan dan informasi dalam satu aplikasi, memberikan pengalaman "all-in-one" bagi pengguna. Model ini selaras dengan tujuan Smart City yang telah menjadi bagian dari Rencana Strategis Diskominfo Kota Bandung

Saat ini Sadayana Bandung Superapp dapat diakses melalui Google Play Store, dan masih terus dikembangkan sehingga dapat mengintegrasikan berbagai layanan publik. Sedangkan substansi dan kualitas layanan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah, namun dalam platform digital, Diskominfo tetap berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan kualitas layanan.

Manfaat Implementasi Superapp

- a. Efisiensi Layanan: Masyarakat tidak perlu beralih aplikasi untuk mengakses layanan berbeda, sehingga meningkatkan kepuasan dan partisipasi.
- b. Kemudahan Akses: Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja.
- c. Transparansi Informasi: Informasi publik (peraturan, program / kegiatan, berita, data pembangunan) tersedia secara real-time dan terpusat.

Fitur Sadayana Bandung Superapp

1. Informasi Publik:

- Berita Resmi.
- Pengaduan dan Layanan Gawat Darurat (112, Damkar), LAPOR
- CCTV, Info Gempa
- Harga Komoditas Pangan.
- Transportasi (Lokasi BisTMB, Bandros), Rute Bus TMB, Rute Angkot, Cek Status Pelanggaran Parkir, Lokasi Sepeda Boseh).
- Kesehatan (Ruang Rawat RS, Stok Darah PMI, Jumlah Kunjungan Puskesmas, Kualitas Udara)

- Lowongan Kerja, Jadwal Mepeling, Formulir Layanan Disdukcapil, Info Sekolah, Produk Hukum, Survey Kepuasan Masyarakat
- 2. Info Tagihan:
 - Cek Tagihan PDAM Tirtawening
 - Cek Tagihan PBB Kota Bandung
 - Cek NJOP PBB Kota Bandung
- 3. Siaran Radio (Sonata, RRI)
- 4. Pariwisata (Destinasi Wisata, Event Pariwisata, Kuliner Khas Bandung, Produk UMKM)
- 5. Lain-lain (Reservasi Bandung Creative Hub, Layanan Arsip dan Perpustakaan).

b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Layanan integrasi digital merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan interoperabilitas data antar instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berperan sebagai wali data sekaligus pengelola pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Platform SPLP digunakan sebagai sarana inti dalam menghubungkan berbagai aplikasi pemerintah, sehingga memungkinkan pertukaran data yang lebih efektif, aman, dan sesuai dengan standar nasional.

Dengan dasar regulasi yang kuat dan implementasi yang sudah berjalan sejak 2023, Kota Bandung telah memanfaatkan SPLP sebagai platform utama integrasi digital. Meskipun masih terdapat beberapa OPD yang belum optimal, secara keseluruhan layanan integrasi digital sudah berjalan baik dan mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Langkah ke depan, Diskominfo akan

memperkuat evaluasi, pendampingan, dan optimalisasi pemanfaatan SPLP, sehingga integrasi data di Kota Bandung dapat berjalan semakin efektif, aman, dan sesuai target nasional SPBE.

c. Layanan Integrasi Aplikasi

Pada saat ini Pemerintah Kota Bandung memiliki 281 aplikasi, terdiri dari Lingkup layanan publik sebanyak 169 aplikasi dan Lingkup administrasi pemerintahan sebanyak 112 aplikasi. Lingkup layanan publik sebanyak 54 aplikasi yang sudah diintegrasikan; 95 aplikasi yang perlu diintegrasikan dan 28 aplikasi yang belum diintegrasikan atau prosentase aplikasi layanan sebanyak 56,8% sudah diintegrasikan. Sedangkan Lingkup administrasi sebanyak 81 aplikasi yang perlu diintegrasikan, 34 aplikasi yang belum diintegrasikan dan 56 aplikasi yang sudah diintegrasikan atau 69,1 % prosentase aplikasi yang sudah diintegrasikan pada lingkup administrasi pemerintahan.

DATA INTEGRASI APLIKASI BERDASARKAN HASIL MONEV APLIKASI PER 01 MARET 2025	
LINGKUP LAYANAN PUBLIK	
Jumlah aplikasi	169
Aplikasi yang perlu diintegrasikan	95
Aplikasi yang sudah diintegrasikan	54
Aplikasi yang belum diintegrasikan	28
Persentase aplikasi yang sudah diintegrasikan lingkup Layanan Publik	56,8%
LINGKUP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	

Jumlah aplikasi	112
Aplikasi yang perlu diintegrasikan	81
Aplikasi yang sudah diintegrasikan	56
Aplikasi yang belum diintegrasikan	34
Persentase aplikasi yang sudah diintegrasikan lingkup Administrasi Pemerintahan	69,1%
TOTAL APLIKASI	281

Dari data tersebut, Diskominfo berupaya secara terus menerus untuk mengintegrasikan aplikasi baik layanan public maupun layanan administrasi pemerintahan.

3. Bidang Data dan Statistik

Bandung Satu Data

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung Bahwa Diskominfo ditunjuk sebagai walidata dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial daerah yang menunjuk Diskominfo sebagai unit penyimpanan, pengamanan dan penyebaran.

Data One map police sebetulnya sudah dikumpulkan sejak Tahun 2016 ke peta tematik di Dinas Ciptabintang, tetapi ada kendala internal di Disciptabintang untuk pemanfaatannya.

Secara kualitas, peta Kota Bandung sudah sangat baik karena sudah dalam skala 1:1000 (anjuran dari RTRW Nasional dan UU Tata Ruang, kab/kota skala yang dibutuhkan untuk perencanaan adalah 1:5000), tetapi pemanfaatannya masih terbatas oleh beberapa perangkat daerah.

Badan Informasi Geospasial (BIG) memprakarsai Bhumandala Award. Acara ini merupakan bentuk penghargaan kepada simpul-simpul jaringan di seluruh Indonesia.

Perkembangan Informasi Geospasial (IG) Nasional dari tahun ke tahun semakin pesat. Informasi Geospasial (IG) banyak dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, hingga mitigasi bencana.

Tingginya kebutuhan Informasi Geospasial (IG), pemerintah meluncurkan sistem pengelolaan data geospasial yang kolektif, terukur, dan terintegrasi melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang diatur dalam Perpres No. 27/2014.

BIG berhasil menghubungkan sekitar 400 simpul jaringan dan menghimpun 24 ribu data set, baik IG dasar maupun IG tematik.

Dalam penguatan one map policy, rencana aksi dan road mapnya sudah disusun dan dalam implementasinya tinggal dilakukan penguatan dalam pemanfaatan dan pengayaan data dari masing-masing produsen data penghasil data kemiskinan, data kesehatan, data pendidikan dan data terkait lainnya.

4. Bidang Infrastruktur TIK

CCTV;

Kota Bandung yang memiliki luas wilayah kurang lebih 17.000 M2, dengan luas wilayah tersebut bila dibandingkan dengan kebutuhan CCTV adalah minimal 2.600 titik lokasi, yang sudah dimiliki oleh Diskominfo sampai dengan tahun 2025 adalah 220 titik kamera ditambah dishub 300 titik kamera, ditambah kamera di taman DPKP, titik banjir DSDABM, masih kurang sekitar 2.000 titik kamera CCTV.

Kebutuhan CCTV yang masih sangat dibutuhkan selain untuk memantau ketertiban, kebersihan (TPS) dan keindahan kota, juga sebagai sarana untuk memantau keamanan serta area banjir yang ada di Kota Bandung. Diskominfo memiliki dukungan kecepatan bandwidth 100 Mbps internasional dan 200 Mbps domestic serta mengelola 34 server yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung.

5. Bidang Diseminasi Informasi

a. Bandung Command Center (BCC)

Bandung Command Center (BCC) dibangun pada tanggal 19 Januari 2015 yang dirancang sebagai ruang kerja Wali Kota untuk observasi/pemantauan kota, analisis data, koordinasi/komunikasi, penyebaran informasi

dan lain sebagainya. Peralatan *Bandung Command Center* dilengkapi dengan fasilitas canggih, dan aplikasi-aplikasi pelayanan publik. Keberadaan BCC ini merupakan inovasi Pemerintah Kota Bandung dan menjadi salah satu kunci dalam upaya mewujudkan *Bandung Smart City*, selain manfaat keberadaan dari BCC tersebut di atas, juga keberadaannya menjadi aduan masyarakat yang bersifat kegawatdaruratan, seperti call 112.

b. Layanan Integrasi Informasi

Layanan informasi terintegrasi dengan perangkat daerah lain, berupa keluhan/ pengaduan masyarakat dilayani melalui beberapa kanal yang berada dalam pengelolaan Bidang diseminasi, yaitu: 1) LAPOR untuk pengaduan yang tidak bersifat gawat darurat. 2) Panggilan Darurat Bandung Siaga 112 untuk pengaduan yang bersifat darurat; 3) Media sosial @humas_bandung, @ppidlaporkotabandung, @bandungsiaga112 yang akan diarahkan menggunakan LAPOR!. Koordinasi dengan perangkat daerah lain/ institusi lain dilaksanakan dengan mekanisme disposisi/ dispatch, dan dilakukan rapat koordinasi antar instansi terkait pengaduan yang dirasa perlu untuk dilakukan pengambilan keputusan/ kebijakan lingkup dinas/ institusi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2024 bahwa Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah dapat kami jelaskan bahwa saat ini integrasi digital sudah memuat kedisiplinan, buang sampah sembarangan, berita hoaks, provokasi dan lain-lain, namun untuk menghindari spam atau kelebihan posting konten, maka kami membagi konten tersebut dalam beberapa akun, misalnya untuk berita hoaks lebih banyak di Instagram

@bdg.saberhoaks, untuk konten tentang kedisiplinan, buang sampah dll lebih banyak di Instagram @humas_bandung, dan untuk kegiatan dinas di Instagram @diskominfobdg.

c. Anti Hoaks

Diskominfo mempunyai kanal bandung saber hoaks di Instagram yang khusus untuk membuat konten meluruskan misinformasi atau berita hoaks. konten tersebut dapat di repost / re-gram oleh akun lain sehingga tersebar informasi yang benar.

6. UPTD. Radio Sonata

Keberadaan Radio Sonata yang berdiri Tahun 1972 yang semula berada di Jl. Ahmad Yani Bandung dengan memiliki 2 kanal yaitu FM dan AM. Radio siaran bersifat audial, yang hanya dapat digunakan dengan cara didengarkan, tapi bukan berarti radio siaran tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai media penerangan. Radio dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang amat memuaskan walau hanya dilengkapi dengan unsur audio. Radio siaran dapat menjalankannya dalam bentuk siaran berita, wawancara, editorial udara, reportase langsung, talk show dan lain-lain.

Sebagai media pendidikan, radio siaran merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan khalayak secara meluas dan serempak. Sebagian alokasi waktu siaran juga diisi oleh acara-acara hiburan bisa berupa musik maupun drama radio.

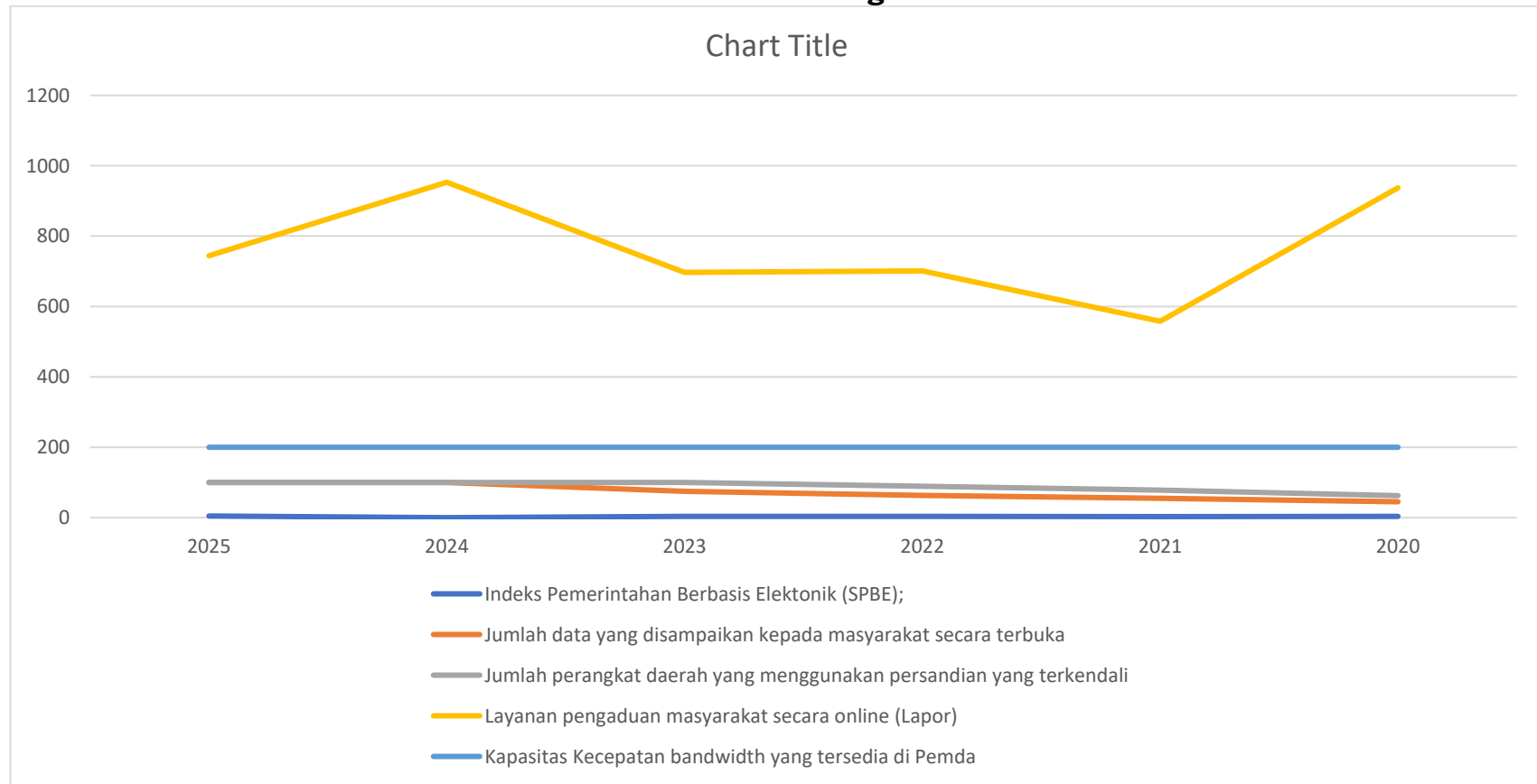
Pada saat ini Radio Sonata melakukan siaran dengan menggunakan gelombang Frekuensi steaming karena belum memiliki Ijin Siaran Radio (FM). Keberadaan kanal frekuensi yang sudah penuh di Kota Bandung membuat Radio Sonata berada pada frekuensi yang bukan merupakan masterplan. Layaknya Radio Sonata bersiaran pada kanal yang merupakan peruntukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Radio Sonata berlokasi di Gedung Pramuka Jl. LRE. Martadinata yang menggunakan frekuensi FM dan Radio yang menggunakan Frekuensi AM berlokasi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta Bandung.

Dari gambaran target dan realisasi pelayanan kinerja dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 yang tertera pada tabel 2.1, pelayanan yang dapat berpengaruh terhadap pelayanan Pemerintah Kota Bandung, yaitu ; Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka; Jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian yang terkendali; Layanan pengaduan masyarakat secara online (Lapor); dan Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini;



Tabel 2.7
Realisasi Pelayanan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

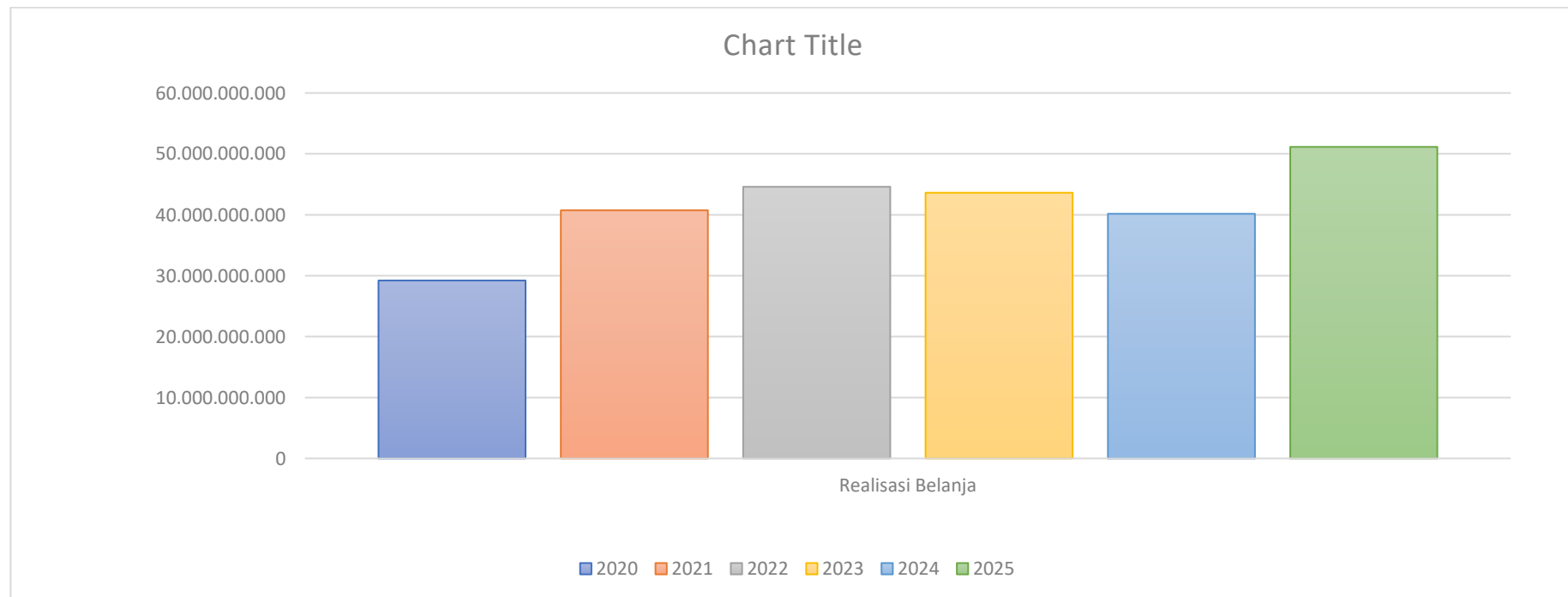


- Sumber Diskominfo Kota Bandung



Sedangkan realisasi anggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang terlihat pada Tabel 2.7, tdi bawah ini ;

Tabel 2.8
Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung



- Sumber Diskominfo Kota Bandung

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah;

a. Masyarakat Kota Bandung dan luar;

Kota Bandung memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2,5 juta orang, dari jumlah penduduk ini merupakan sasaran penyampaian layanan informasi berupa program kegiatan baik yang sedang maupun yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung, sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Demikian juga warga di luar Kota Bandung menjadi sasaran layanan informasi karena dengan adanya informasi yang bersifat positif dapat mendatangkan investasi ke Kota Bandung.

b. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, Diskominfo membina Kelompok / Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) 151 kelurahan di Kota Bandung untuk:

- Membantu penyebarluasan program pemerintah kepada masyarakat.
- Jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta
- Mitra dialog dalam merumuskan kebijakan publik.

Saat ini, dengan hadirnya aplikasi untuk KIM baik di tingkat pusat (kim.id) dan tingkat kota (kim.bandung.go.id), KIM lebih melibatkan generasi muda terutama untuk penyebarluasan program di tingkat kelurahan masing-masing melalui media digital agar program dari kelurahan atau masyarakat di kelurahan tersebut dapat disosialisasikan.

c. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Komunitas relawan teknologi dan komunikasi menjadi mitra kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, yang diharapkan bukan hanya untuk komunitasnya saja itu sendiri yang mengetahui program-program Pemerintah Kota Bandung maupun pusat, juga memberikan dampak positif terhadap lingkungannya.

d. Para pelajar yang ada di Kota Bandung untuk penyuluhan penggunaan internet sehat.

Diskominfo memiliki peran penting dalam mengantisipasi bahaya akses internet bagi generasi muda, terutama para pelajar. Diskominfo berinisiatif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk generasi muda, dengan melakukan kampanye edukasi untuk menyebarkan informasi yang akurat dan positif, serta menghentikan penyebaran konten negatif seperti hoaks, misinformasi, dan disinformasi.

Untuk menghindari bahaya dan maraknya konten hoaks di ruang digital, Diskominfo menginisiasi pembuatan akun instagram @bandungsaberhoaks, dengan tujuan untuk meminimalisir banyaknya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Diskominfo juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas, akademisi, lembaga pemerintah, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk memberikan literasi digital dan mendidik masyarakat tentang cara menggunakan internet dengan aman dan bijak.

Dalam penyuluhan ini, ada beberapa poin penting terkait penggunaan internet sehat, di antaranya:

- Internet Sehat: Pentingnya menjaga etika dan sopan santun di dunia maya, menghindari hoaks, serta mengenali bahaya informasi palsu.
- Keamanan Online: Menjelaskan tentang pentingnya menjaga privasi di media sosial.
- Cyberbullying: Narasumber mengajak pelajar untuk mengenali bentuk-bentuk cyberbullying dan bagaimana cara melaporkannya.
- Konten Negatif: Mengingatkan pelajar untuk menghindari konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian, serta memberikan panduan mengenai akses konten yang sesuai untuk usia mereka.
- Pemanfaatan Positif Internet: Narasumber mendorong pelajar untuk memanfaatkan internet sebagai sumber informasi dan sarana belajar yang mendukung prestasi akademik.
- Waktu Penggunaan Internet: Manajemen waktu dalam penggunaan internet agar tetap seimbang dengan aktivitas belajar dan sosial.

2.1.5 Mitra PD

Mitra kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dalam mendukung pelayanan, kinerja maupun data pendukung dari berbagai perangkat daerah yang ada di lingkungan Kota Bandung.

Data Mitra Perangkat Daerah Dalam Mendukung Kinerja Diskominfo

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan SPBE	Bapperida Inspektorat Bagian Hukum	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Tata Kelola SPBE	Bapperida, Inspektorat, BKAD, BKPSDM,DPMPTS P, DISDUKCAPIL, Bag. Organisasi, Bag. Pengadaan	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Manajemen SPBE	Bapperida, Inspektorat, BKAD, BKPSDM, Disarpus, Bag. Organisasi, Bag. Balap	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Layanan SPBE	Disdukcapil, DPMPTSP, Disnaker, Bag. Hukum	Tersedianya dokumen SPBE
2	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Layanan dinas ke masyarakat	Bagian Organisasi	Tersedianya dokumen IKM

Sedangkan mitra kerja PD selain mendukung Indikator Kinerja Utama juga mendukung kinerja layanan kepada masyarakat, yaitu;

NO	LEMBAGA/ KEMENTERIAN/ PD/ORGANISASI	URAIAN	KETERANGAN
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Evaluasi dan penilaian Smart City;	Nilai Smart City
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Evaluasi dan penilaian Sistem Pemerintahan	Nilai SPBE

		Berbasis Elektronik (SPBE)	
3	Badan Siberi dan Sandi Nasional (BSSN)	Pelatihan keamanan data dan sertifikasi keamanan informasi	Sertifikasi
4	BPS Kota Bandung	Data Bandung satu Data	
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kerjasama sosialisasi kepada masyarakat	Sosialisasi di tingkat kelurahan
6	Relawan TIK (RTIK)	Sosialisasi di kalangan pelajar dan mahasiswa serta generasi muda	
7	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Bandung Open Data, Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR) dan sebagainya.	

2.1.6 Dukungan BUMD

Dukungan BUMD terhadap capaian kinerja secara langsung tidak ada, tetapi adanya dukungan materil (sponsorship) terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.7 Kerjasama Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian telah terjalin kerjasama daerah, Lembaga, kemeterian dan lain-lain di seluruh Indonesia, sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Diskominfo sebanyak 7 kerjasama.



NO.	Tahun	PERJANJIAN KERJA SAMA						
		PROPINSI	Keterangan	KAB. / KOTA	keterangan	PERGURUAN TINGGI	keterangan	JUMLAH
1	2021	1	Diskominfo dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat			1	PKS Diskominfo dengan Telkom University	2
2	2022			2	1. PKS Diskominfo dengan Kota Cimahi 2. PKS Diskominfo dengan Kab. Subang	1	PKS Diskominfo dengan STTB (Sekarang Universitas Teknologi Bandung)	3
3	2023	-	-	-	-	-	-	-
4	2024			2	1. PKS Diskominfo dengan Kab. Mamuju Tengah 2. PKS Diskominfo dengan Kab. Bangkalan Madura			2
5	2025							
TOTAL		1		4		2		7

* Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan eksternal yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

- a. Nilai capaian Index SPBE bukan hanya jadi tanggungjawab Diskominfo sehingga dalam indikator penilaiannya perlu melibatkan semua perangkat daerah dan OPD yang bertanggungjawab dalam rencana strategis Kota seperti Bappelitbang, Proses Bisnis di Bagian organisasi, rencana anggaran dengan BKAD dan Tim TAPD, Manajemen Risiko dan Audit dengan Inspektorat, Manajemen SDM dan Pengetahuan dengan BKPSDM serta berbagai layanan internal dan Publik di masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Kebutuhan kecepatan dan spesifikasi internet pada masing-masing OPD belum sesuai dengan kapasitas. Dikarenakan masing-masing OPD

- memiliki kebutuhan kecepatan internet yang perlu diukur lebih lanjut sesuai dengan penggunaannya.
- c. Kurangnya wawasan dari pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik dan pengelola pengaduan publik di OPD akibat dari pergantian petugas.
 - d. Kurangnya koordinasi mengenai OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan;
 - e. Secara kelembagaan, perlu adanya unit kerja khusus untuk pengembangan sistem informasi.
 - f. Integrasi Sistem Informasi dan berbagi pakai data dengan lembaga vertikal masih terkendala di dalam pemanfaatan platform Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dikarenakan belum semua lembaga vertikal menggunakan layanan SPLP ini.
 - g. Untuk internal Kota Bandung, belum semua perangkat daerah memahami dan bisa memanfaatkan layanan SPLP ini dikarenakan SDM kurang .
 - h. Implementasi urusan statistik sangat bergantung pada peran aktif dari seluruh perangkat daerah. Sehingga ketika perangkat daerah dengan bobot pekerjaan yang tinggi, menghambat proses pencapaian target urusan statistik.
 - i. Belum optimalnya daya dukung terkait urusan persandian dan keamanan sistem informasi, yang mencakup tata kelola sistem manajemen keamanan informasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia keamanan informasi serta pemenuhan perangkat teknologi siber terkini guna mendukung kinerja.

Penyebab dari permasalahan yaitu;

- a. Masih kurang memahami penerapan Indikator kinerja SPBE di berbagai Perangkat daerah sehingga target dan capaian dapat menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya diskominfo.
- b. Belum adanya kajian kebutuhan layanan internet ke masing-masing OPD terhadap kebutuhan layanan internet yang disesuaikan kecepatannya dengan penggunaan, sehingga lebih efisien dan efektif.
- c. Kurangnya bimbingan teknis serta pelatihan untuk pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik serta pengelola pengaduan publik dari OPD.

- d. Kurang optimalnya koordinasi antara OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan.
- e. Belum membentuk unit kerja khusus yang mengurus pengembangan sistem informasi.
- f. Belum adanya dukungan kementerian Komdigi untuk lebih proaktif mensosialisasikan pemanfaatan SPLP ke lembaga-lembaga vertikal.
- g. Perlu diadakan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang kesulitan dalam memanfaatkan layanan SPLP ini sebagai wadah berbagi pakai data dan integrasi Sistem Informasi.
- h. Perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang paling berkontribusi dalam pengelolaan urusan statistik.
- i. Perlu daya dukung perangkat daerah terkait urusan persandian dengan meningkatkan SDM dan keamanan informasi.

Dari permasalahan dan pokok masalah dapat tersebut di atas, maka dapat di lihat dari Tabel 2.8 di bawah ini;

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya Pemahaman tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di masing-masing perangkat daerah	Nilai capaian Indeks SPBE bukan hanya jadi tanggungjawab Diskominfo sehingga dalam indikator penilaiannya perlu melibatkan semua perangkat daerah dan OPD yang bertanggungjawab dalam rencana strategis Kota seperti Bappelitbang, Proses Bisnis di Bagian organisasi, rencana anggaran dengan BKAD dan Tim TAPD, Manajemen Risiko dan Audit dengan Inspektorat, Manajemen SDM dan Pengetahuan dengan BKPSDM serta berbagai layanan internal dan Publik di masing-masing Perangkat Daerah.	Masih kurang memahami penerapan Indikator kinerja SPBE di berbagai Perangkat daerah sehingga target dan capaian dapat menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya diskominfo.
2	Kebutuhan internet sangat tinggi	Kebutuhan kecepatan dan spesifikasi internet pada masing-masing OPD belum sesuai dengan kapasitas.	Belum adanya kajian kebutuhan layanan internet ke masing-masing OPD terhadap kebutuhan layanan internet



		Dikarenakan masing-masing OPD memiliki kebutuhan kecepatan internet yang perlu diukur lebih lanjut sesuai dengan penggunaannya.	yang disesuaikan kecepatannya dengan penggunaan, sehingga lebih efisien dan efektif.
3	Kebutuhan media sosial tinggi sebagai sarana informasi	Kurangnya wawasan dari pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik dan pengelola pengaduan publik di OPD akibat dari pergantian petugas.	Kurangnya bimbingan teknis serta pelatihan untuk pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik serta pengelola pengaduan publik dari OPD.
4	Kurang maksimalnya layanan kegawatdaruratan	Kurangnya koordinasi mengenai OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan	Kurang optimalnya koordinasi antara OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan
5	Belum memiliki UPT.Layanan Informasi	Secara kelembagaan, perlu adanya unit kerja khusus untuk pengembangan system informasi.	Belum membentuk unit kerja khusus yang mengurus pengembangan system informasi
6	Belum maksimalnya integrasi aplikasi	Integrasi Sistem Informasi dan berbagi pakai data dengan lembaga vertikal masih terkendala di dalam pemanfaatan platform Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dikarenakan belum semua lembaga vertikal menggunakan layanan SPLP ini	Belum adanya dukungan kementerian Komdigi untuk lebih proaktif mensosialisasikan pemanfaatan SPLP ke lembaga-lembaga vertikal
7	Kurangnya SDM tentang Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Untuk internal Kota Bandung, belum semua perangkat daerah memahami dan bisa memanfaatkan layanan SPLP ini dikarenakan SDM kurang	Perlu diadakan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang kesulitan dalam memanfaatkan layanan SPLP ini sebagai wadah berbagi pakai data dan integrasi Sistem Informasi.
8	Perlunya peningkatan SDM tentang statistik	Implementasi urusan statistik sangat bergantung pada peran aktif dari seluruh perangkat daerah, sehingga ketika perangkat daerah dengan bobot pekerjaan yang tinggi, menghambat proses pencapaian target urusan statistik.	Perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang paling berkontribusi dalam pengelolaan urusan statistik
9	Kurangnya SDM Persandian	Belum optimalnya daya dukung terkait urusan persandian dan keamanan sistem informasi, yang mencakup tata kelola sistem manajemen keamanan informasi,	Perlu daya dukung perangkat daerah terkait urusan persandian dengan meningkatkan SDM dan keamanan informasi.

		peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia keamanan informasi serta pemenuhan perangkat teknologi siber terkini guna mendukung kinerja.	
--	--	---	--

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2.2 Isu Strategis

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan

efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu **"MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL "**,

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah ; manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan serta kokohnya interaksi social, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.

Misi Kota Bandung yang meliputi :

1. *Mewujudkan kuitas hidup warga Kota Bandung yang Unggul;*
2. *Mewujudkan Bandung sebagai kota yang Terbuka, inklusif, demokratis, setara dan berkeadilan;*
3. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang Amanah, bersih, jujur, efektif, akuntabel dan terpercaya;*
4. *Mewujudkan Kota Bandung yang Maju dan berdaya saing dalam perekonomian dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan;*
5. *Membentuk karakter warga Kota Bandung yang Agamis, moderat dan toleran.*

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Bandung serta RPJMD Kota Bandung 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu;

- a. Membangun peningkatan pengetahuan SDM yang mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- b. Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikutserta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung
- c. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Diskominfo merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
- d. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

Sasaran strategis Diskominfo Kota Bandung diselaraskan Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Asta Cita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2015—2019.

Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat

informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 8 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan

Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Demikian juga diselaraskan dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, meliputi komunikasi, informatika, persandian dan statistik sektoral berdasarkan asas otonomi, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dengan semangat itu, maka Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2025-2029 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu **“Jabar Istimewa”**. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung misi kepala daerah selama periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa dan professional pada bidang tugasnya masing-masing;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasisi sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara- selatan dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana

- Pendidikan, Kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional;
4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan *clear governance*.

Permasalahan yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telaahan RTRW dan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan juga tidak secara langsung berkaitan dengan telaahan KLHS.

Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut sejalan dengan isu-isu strategis ditingkat kota.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam urusan kominfo, statistik dan persandian di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 2.10

Isu Strategis dalam Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian di Kota Bandung

NO	URUSAN	ISU STRATEGIS
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Mengoptimalkan pengembangan dan integrasi aplikasi, karena dari 281 aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, baru 110 aplikasi yang sudah terintegrasi, sehingga masih menjadi tantangan ke depan untuk dapat mengintegrasikan semua aplikasi yang ada untuk menuju <i>smart city</i> level “ <i>smart</i> ”. 2. Meningkatkan wawasan dari pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik dan pengelola pengaduan publik di Perangkat Daerah.
2	URUSAN STATISTIK	Mengoptimalkan manajemen data dan layanan data, dari proses perencanaan data, pengumpulan, pengolahan hingga publikasi data, sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan dan dibagipakaikan secara berkelanjutan.
3	URUSAN PERSANDIAN	Mengoptimalkan daya dukung terkait urusan persandian dan keamanan sistem informasi, yang mencakup tata kelola sistem manajemen keamanan informasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia keamanan informasi serta pemenuhan perangkat teknologi siber terkini guna mendukung kinerja.

Berdasarkan isu-isu yang disajikan tersebut di atas mulai dari isu global, nasional, regional maupun tingkat kota, dapat di lihat pada Tabel 2.6 di bawah ini;

Tabel 2.11



Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tata Kelola Pemerintahan Mengelola pemerintahan daerah yang berorientasi hasil dan bersih serta mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik berbasis digital. Selain itu, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Beberapa isu dalam tata kelola pemerintahan, antara lain terkait penerapan dan penegakan regulasi, penataan kelembagaan, pelaksanaan program pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berorientasi hasil ataupun belum menjawab isu strategis daerah, belum optimalnya manajemen SDM ASN, belum optimalnya kualitas pelayanan publik, belum diterapkannya teknologi dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan secara optimal	1. Menurunnya Evaluasi Kematangan Smart City 2. Menurunnya Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti 3. Belum optimalnya Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi 4. Belum optimalnya Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan 5. Belum optimalnya Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur 6. Belum optimalnya Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Belum Optimalnya penagakan hukum, implementasi good govenance dan digitalisasi dalam tata kelola Pemerintahan	12. Perkembangan n demografi global. Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55 persen). 2 Geopolitik dan geoekonomi. Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen. 3 Perkembangan teknologi. Teknologi akan menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini. 4 Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen. 5 Konstelasi perdagangan global. Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun. 6 Tata kelola keuangan global. Pergeseran kebijakan fiskal, Central Bank Digital Currency (CBDB), dan Fintech. 7 Pertumbuhan kelas menengah (middle class). Jumlah middle dan upper class lebih dari 90 persen (8,8 miliar). 8 Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam. 9 Perubahan iklim. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana. 10. Pemanfaatan luar angkasa (space economy). Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.	Asta Cita 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efesien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan clear governance.	1. Mengoptimalkan pengembangan dan integrasi aplikasi, karena dari 281 aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, baru 110 aplikasi yang sudah terintegrasi, sehingga masih menjadi tantangan ke depan untuk dapat mengintegrasikan semua aplikasi yang ada untuk menuju smart city level “smart”. 2. Meningkatkan wawasan dari pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik dan pengelola pengaduan publik di Peringkat Daerah. 3. Mengoptimalkan manajemen data dan layanan data, dari proses perencanaan data, pengumpulan, pengolahan hingga publikasi data, sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan dan dibagipakaikan secara berkelanjutan. 4. Mengoptimalkan daya dukung terkait urusan persandian dan keamanan sistem informasi, yang mencakup tata kelola sistem manajemen keamanan informasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber



dan terintegrasi				ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.		daya manusia keamanan informasi serta pemenuhan perangkat teknologi siber terkini guna mendukung kinerja.
------------------	--	--	--	--	--	--

- Sumber : Diskominfo Kota Bandung



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki peran dan strategis dalam urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik dan urusan persandian. dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Bandung yaitu ***”MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL ”***, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029. Sebagai penunjang pembangunan dalam jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab yang besar dalam Misi 3 ” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif ” pada RPJMD 2025-2029, Tujuan RPJMD adalah : **Penguatan fondasi transformasi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik**, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Sedangkan sasarannya adalah “ **Terciptanya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak**”, Indikator Perasentase ketercapaian Reformasi Birokrasi General.

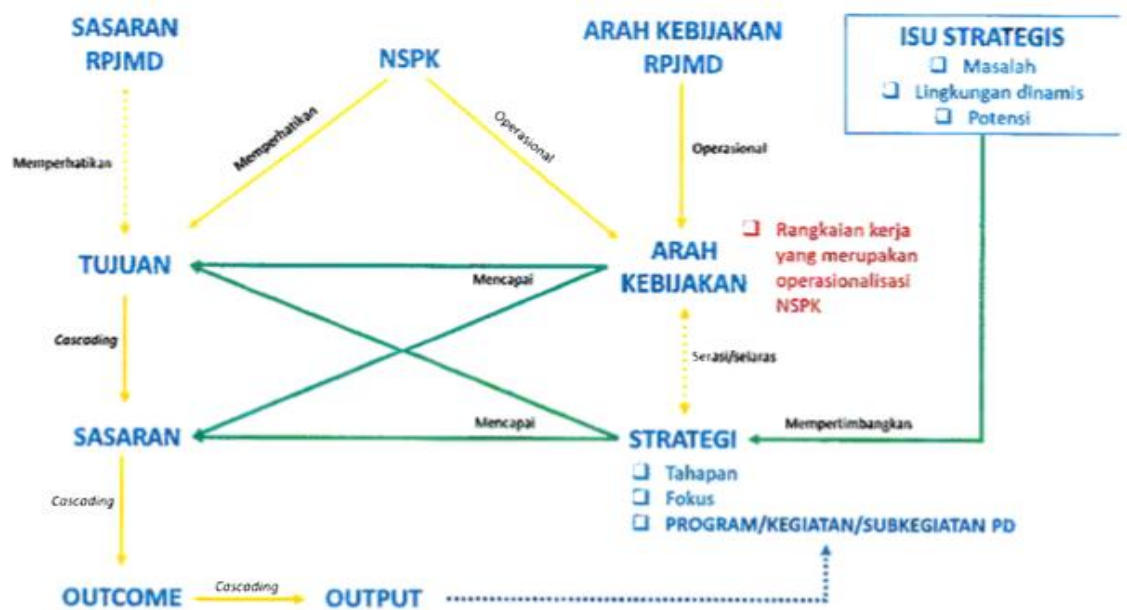
Adapun tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, adalah **Terciptanya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak** dengan indikator; Nilai Reformasi Birokrasi General, sedangkan Sasaran adalah : 1. **Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel** dengan indikator ; Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE menjadi

Indeks Pemerintah Digital. 2. **Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo**, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat.

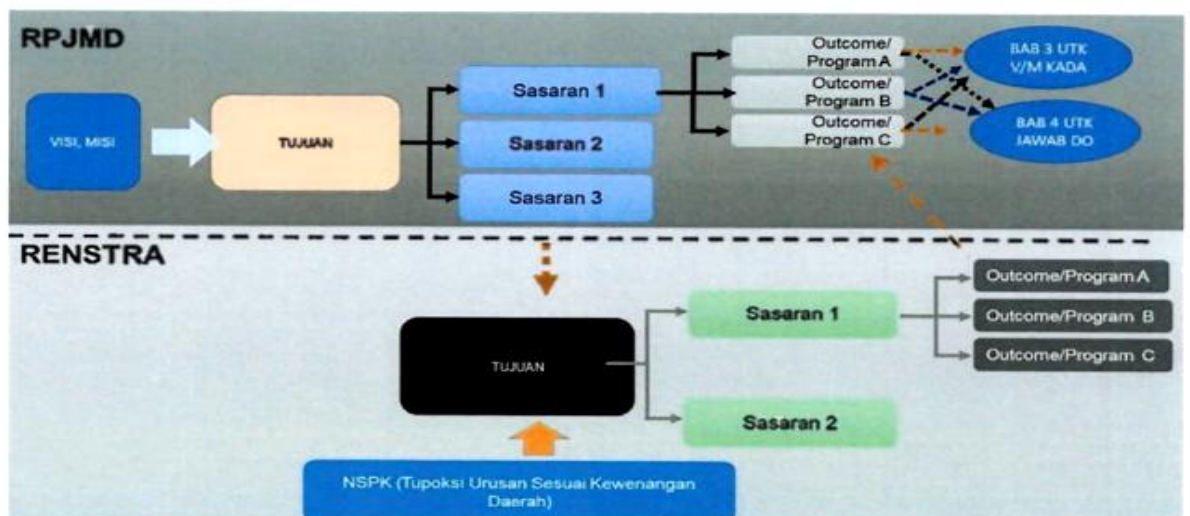
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, yaitu; 1. Meningkatnya Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan public, indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo, Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat PD.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD





Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, yaitu dapat di liat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 3.3

**TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DISKOMINFO
TAHUN 2025-2029
Sebelum Perubahan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. RPJMD : Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak		Nilai Reformasi Birokrasi General	77	79	81	83	85	87	
		1 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	4,62	4,65	4,68	4,71	4,72	4,74	
		2 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	95,90	95,91	95,92	95,93	95,94	95,95	

#Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 3.4

**TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DISKOMINFO
TAHUN 2025-2029
Setelah Perubahan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK : Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) RPJMD : Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak		Nilai Reformasi Birokrasi General	77	79	81	83	85	87	
		1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Lingkup Kewenangan Diskominfo	NA	1,87	2,0	2,3	2,4	2,5	
		2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	96,05	96,06	96,07	96,08	96,09	96,10	

#Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Norma, Standar, Prosedur dan Kaidah (NSPK) yang menjadi acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang semula Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintah Digital (Pemdi), berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi), dengan adanya peratutan ini pada Tahun 2026 akan beralih dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital, SPBE membuat layanan pemerintah lebih efisien dan transparan. Pemerintah Digital yang lebih fokus pada masyarakat. Pemerintah Digital hadir bukan sekadar memakai teknologi, tapi benar-benar menempatkan warga sebagai pusat layanan. Tujuannya jelas: layanan yang cepat, mudah, terintegrasi, dan memuaskan bagi pengguna namun demikian karena aturannya belum diundangkan dan diterapkan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung masih menggunakan indeks SPBE sebelum aturan yang baru terbit dan diterapkan.

Dalam pelaksanaan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025-2030, diperlukan penahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, hal ini dapat di lihat pada Tabel 3.4 di bawah ini;

TABEL. 3.5
PENAHPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan leveling Bandung Smart City 2. Peningkatan Katagori Nilai SPBE/Pemerintah Digital	1. Peningkatan leveling Bandung Smart City 2. Pemahaman Indeks Penilaian Pemerintahan Digital	1. Peningkatan leveling Bandung Smart City 2. Pencapaian Indeks Penilaian Pemerintahan Digital	1. Peningkatan leveling Bandung Smart City 2. Pencapaian peningkatan Indeks Penilaian Pemerintahan Digital	1. leveling Bandung Smart City nomor 1 di Indoenesia



3. Mempercepat pelaksanaan integrasi aplikasi pada perangkat daerah	3. Mempercepat pelaksanaan integrasi aplikasi pada perangkat daerah	3. Mempercepat pelaksanaan integrasi aplikasi pada perangkat daerah	3. Mempercepat pelaksanaan integrasi aplikasi pada perangkat daerah	2. Pencapaian maksimal Indeks Penilaian Pemerintahan Digital
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan	4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan	4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan	4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan	3. Mempercepat pelaksanaan integrasi aplikasi pada perangkat daerah
5. Keberadaan BCC sebagai kebijakan pimpinan	5. Peningkatan Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan	5. Peningkatan Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan	5. Peningkatan Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan	4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan
6. Peningkatan literasi internet	6. Peningkatan literasi internet	6. Peningkatan literasi internet	6. Peningkatan literasi internet	5. Peningkatan Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan
7. Perencanaan TIK	7. Peningkatan perencanaan TIK	7. Peningkatan perencanaan TIK	7. Peningkatan perencanaan TIK	6. Peningkatan literasi internet
8. Peningkatan dan pemerataan Jaringan infrastruktur setiap pengguna	8. Peningkatan dan pemerataan Jaringan infrastruktur setiap pengguna	8. Peningkatan dan pemerataan Jaringan infrastruktur setiap pengguna	8. Peningkatan dan pemerataan Jaringan infrastruktur setiap pengguna	7. Peningkatan perencanaan TIK
9. Penambahan kapasitas bandwidth.	9. Penambahan kapasitas bandwidth.	9. Penambahan kapasitas bandwidth.	9. Penambahan kapasitas bandwidth.	8. Peningkatan dan pemerataan Jaringan infrastruktur setiap pengguna
10. Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya.	10. Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya.	10. Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya.	10. Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya.	9. Penambahan kapasitas bandwidth.
11. Pemanfaatan layanan pengaduan Online LAPOR	11. Peningkatan layanan pengaduan Online LAPOR	11. Peningkatan layanan pengaduan Online LAPOR	11. Peningkatan layanan pengaduan Online LAPOR	10. Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya.
12. Layanan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya	12. Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya	12. Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya	12. Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya	11. Peningkatan layanan pengaduan Online LAPOR



				12 Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya
--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

3.3 Analisis Lingkungan Strategis (Analisis SWOT)

Dalam upaya memenuhi target Dinas Komunikasi dan Informatika 5 tahun ke depan diperlukan Analisa Swott, seperti yang tergambar pada di bawah ini:

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang/Oportunity	Ancaman/Threat
	1. Adanya aturan UU tentang keterbukaan informasi publik. 2. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat 3. Kota Bandung yang strategis sebagai pusat kegiatan pendidikan, bisnis dan pusat pemerintahan Jawa Barat. 4. Meningkatnya jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi serta standarisasi aplikasi di Pemkot Bandung. 5. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan Instansi Pemerintah lain yang lebih mudah 6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan serta peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja pada era globalisasi	1. Pelaksanaan Bandung Smart City belum adanya dukungan secara maksimal. 2. Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat. 3. Inovasi terhadap Aplikasi yang dilakukan Instansi Pusat dan Daerah mengakibatkan sulitnya Integrasi dan Interoperabilitas Data 4. Penyalahgunaan data dan informasi hoax oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 5. Serangan Hacker, virus, worm, phising dsb terhadap sistem aplikasi di lingkungan pemkot Bandung. 6. Kesadaran dan kemampuan pengelola data di perangkat daerah masih rendah



	7. Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.	
Kekuatan/Strenght 1. Kuatnya komitmen Pimpinan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan telah dibentuknya Dewan Smart City, memiliki Masterplan Smart City dan Masterplan TIK dan sebagainya . 2. Integrasi penerapan aplikasi sudah berjalan dengan baik, dan menjadikan kinerja pemerintahan lebih efektif dan efisien 3. Telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dan open data. 4. Telah memiliki layanan pengaduan secara online LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) 5. Memiliki sarana Bandung Command Center (BCC) sebagai pusat data dan manajemen pengelolaan informasi pimpinan.	Strategi (S – O) 1. Peningkatan kematangan leveling Bandung Smart City 2. Mempercepat pelaksanaan integrasi aplikasi pada perangkat daerah 3. Peningkatan perencanaan TIK	Strategi (W – O) 1. Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya 2. Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK yang terintegrasi 3. Peningkatan pelayanan informasi melalui open data 4. Mendorong dewan smart city untuk lebih aktif 5. Peningkatan layanan open data
kelemahan/Weakness 1. Kurangnya SDM Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik 2. Belum optimalnya fungsi Dewan Smart City, Tim Pelaksana Gerakan smart City, fungsi Tim Evaluator SPB 3. Masih rendahnya akan pemahaman aplikasi dan pengamanan data/informasi dikarenakan ketidaktahuan/ kepedulian dalam mengelola/pengamanan data informasi. 4. Belum meratanya sebaran bandwidth ke setiap pengguna 5. Keamanan data masih perlu ditingkatkan	Strategi (S – T) 1. Peningkatan penyebaran interkoneksi dan wifi fasos/fasum 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan 3. Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya.	Strategi (W – T) 1. Peningkatan dan pemerataan Jaringan insfrastruktur setiap pengguna 2. Peningkatan keamanan sistem informasi 3. Peningkatan aplikasi Sadayana 4. Peningkatan wawasan pengelola data di tiap PD



6. Tata kelola TIK masih perlu ditingkatkan 7. Masih kurangnya integrasi aplikasi layanan yang ada di tiap PD	4. Penambahan kapasitas bandwidth 5. Pemanfaatan layanan pengaduan Online LAPOR 6. Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan	
--	---	--

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

3.4 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025-2029, Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Diskominfo. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Diskominfo harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Diskominfo yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan.

Strategi yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025-2029, yaitu;

Tujuan : Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak.

Sasaran : 1. Meningkatnya penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik

2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskomin

Strategi :

1. Mempercepat pelaksanaan integrasi aplikasi pada perangkat daerah;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan;
3. Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan;
4. Peningkatan literasi internet;
5. Peningkatan perencanaan TIK;
6. Peningkatan dan pemerataan Jaringan insfrastruktur setiap pengguna;
7. Penambahan kapasitas bandwidth;
8. Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya;
9. Pemanfaatan layanan pengaduan Online LAPOR;
10. Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya.

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, maka Diskominfo Kota Bandung menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan menyandingkan arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut;

TABEL 3.6
TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISKOMINFO
Sebelum Perubahan

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah; Pelaksanaan SPBE berdasar pada; 1. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE 3. Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE	1. Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima 2. Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 3. Perwujudan e-government dan smart city	1.Integrasi pelayanan di seluruh instansi melalui integrasi aplikasi 2.Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan 3.Mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan TIK 4.Memberikan kesempatan SDM Diskominfo untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan bidangnya	



TABEL 3.7
TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISKOMINFO
Sesudah Perubahan

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Pemerintah Digital (Pemdi) merupakan rangkaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara terpadu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Operasional tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi, tetapi mencakup pengelolaan proses bisnis, data, layanan, sumber daya manusia, keamanan, serta integrasi antarinstansi. Pelaksanaan Pemerintah Digital berdasar pada; Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi)	1. Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima 2. Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 3. Perwujudan e-government dan smart city	1.Integrasi pelayanan di seluruh instansi melalui integrasi aplikasi 2.Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan 3.Mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan TIK 4.Memberikan kesempatan SDM Diskominfo untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan bidangnya	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana program dan kegiatan Dinas komunikasi dan informatika Kota Bandung sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja urusan wajib sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - h. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sum Daya Air dan Listrik;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- b. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1. Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik
 - a.Sub Kegiatan Relasi Media;
 - b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
 - e.Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik;
 - g.Sub Kegiatan Penyusunan Konten;
 - h. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- 1. Kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
- 2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;
- d. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas;
- g. Sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

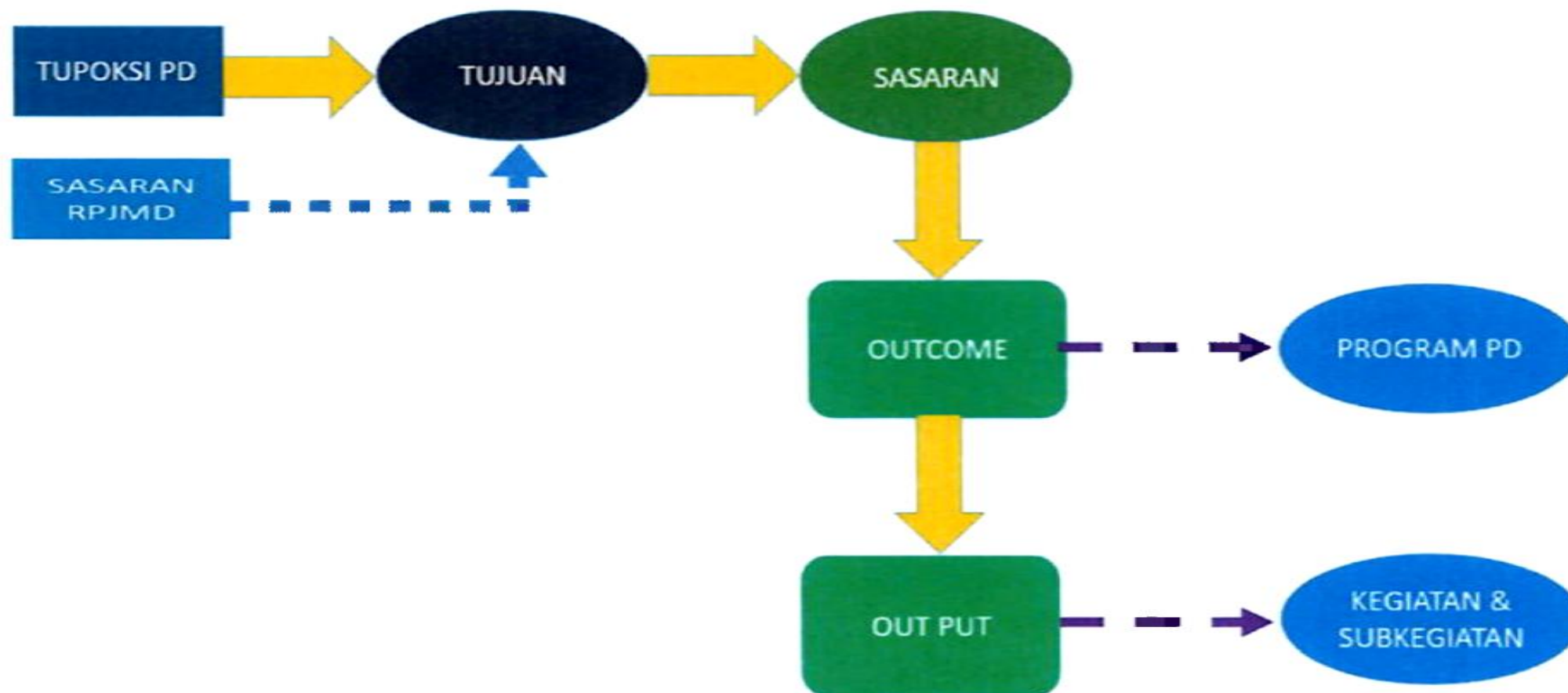
- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional ;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral;
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada Gambar 1, dapat dilihat di bawah ini;

Gambar 4.1
KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
RENSTRA DISKOMINFO





TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
NSPK : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. RPJMD : Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak				Nilai Reformasi Birokrasi General		
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo			Indeks Kepuasan Masyarakat PD		
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai Sakip PD		
			Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	16.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan evaluaasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	16.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	16.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16.01.2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	



			Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai aturan		Persentase Administrasi Umum	16.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	16.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16.01.2.06.03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	
				Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	16.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	16.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	16.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.01.2.06.09 Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	16.01.2.08.03 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai tepat waktu	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	16.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan unit perbaikan peralatan kantor	16.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	16.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	



		Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo		
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Melalui Media, Kelompok informasi Masyarakat dan Medsos		Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
					Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan		Indeks Reformasi Birokrasi
					Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio		
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata		
			Meningkatnya Pelaksanaan Sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	16.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	16.02.2.01.0014 Sub Kegiatan Relasi Media	
				Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui mitra kerja	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	16.02.2.01.0015 Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Ketersediaan data informasi PPID	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	16.02.2.01.0017 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
				Pelaksanaan Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	16.02.2.01.0019 Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui Radio Sonata	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	16.02.2.01.0021 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Ketersediaan data komunikasi	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	16.02.2.01.0022 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
				Ketersediaan konten bahan informasi	Jumlah Konten Informasi Publik	16.02.2.01.0023 Sub Kegiatan Penyusunan Konten	
				Peningkatan kualitas SDM di bidang komunikasi publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang	16.02.2.01.0024	



					difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya SPBE yang terpadu dan efisien		1. Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
					2. Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan		
					3. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indikator Reformasi Birokrasi
					4. Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur		
			Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen SPBE sesuai dengan program yang ditentukan		Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	16.03.2.02 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Cakupan leveling Pemerintahan Digital		
					Prosentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah		
				Pelaksanaan PD yang menggunakan WAN dan server yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	16.03.2.02.13 Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
				Pelaksanaan Pengembangan SDM TIK	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	16.03.2.02.19 Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Pelaksanaan pengembangan infrastruktur publik	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	16.03.2.02.24 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Pelaksanaan pengelolaan aplikasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	16.03.2.02.32 Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Pelaksanaan aplikasi yang diintegrasikan pada perangkat daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	16.03.2.02.34 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
				Pelaksanaan kualitas interkoneksi internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang	16.03.2.02.36 Sub Kegiatan Penyediaan akses internet	



					memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		
				Pelaksanaan perencanaan TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	16.03.2.02.37 Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				Pelaksanaan evaluasi TIK di Kota Bandung	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	16.03.2.02.38 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya Kualitas Data Yang Terverifikasi		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
					Indeks Pembangunan Statistik		Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyusunan data dan survai sebagai bahan informasi		Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	20.02.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan Survei kepada masyarakat	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	20.02.2.01.0018 Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Pelaksanaan Publikasi Data	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	20.02.2.01.0019 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Pelaksanaan data secara terbuka yang memiliki standar	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	20.02.2.01.0020 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Meningkatnya Keamanan Informasi di seluruh Perangkat Daerah		Nilai Penerapan SPBE Lingkup Persandian	21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
			Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan keamanan informasi pada perangkat daerah		Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	21.02.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan audit aplikasi pada perangkat daerah	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	21.02.2.01.0007 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

#Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Setelah Perubahan

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
NSPK : Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) RPJMD : Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak				Nilai Reformasi Birokrasi General		
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo			Indeks Kepuasan Masyarakat PD		
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai Sakip PD		
			Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	16.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan evaluaasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	16.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	16.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16.01.2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai aturan		Persentase Administrasi Umum	16.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	



				Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	16.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16.01.2.06.03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	
				Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	16.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	16.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	16.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.01.2.06.09 Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	16.01.2.08.03 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai tepat waktu	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	16.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan unit perbaikan peralatan kantor	16.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	16.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	
		Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang			Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Lingkup Kewenangan Diskominfo		



		lincah, kolaboratif dan akuntabel					
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Melalui Media, Kelompok informasi Masyarakat dan Medsos		Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Layanan Informasi	16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
					Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan		Indeks Reformasi Birokrasi
					Nilai Penerapan Pemerintah Digital layanan informasi masyarakat melalui Radio Sonata		
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata		
			Meningkatnya Pelaksanaan Sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	16.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	16.02.2.01.0014 Sub Kegiatan Relasi Media	
				Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui mitra kerja	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	16.02.2.01.0015 Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Ketersediaan data informasi PPID	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	16.02.2.01.0017 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
				Pelaksanaan Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	16.02.2.01.0019 Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui Radio Sonata	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	16.02.2.01.0021 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Ketersediaan data komunikasi	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	16.02.2.01.0022 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
				Ketersediaan konten bahan informasi	Jumlah Konten Informasi Publik	16.02.2.01.0023 Sub Kegiatan Penyusunan Konten	



				Peningkatan kualitas SDM di bidang komunikasi publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	16.02.2.01.0024 Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya Pemdi yang terpadu dan efesien		1. Nilai Penerapan Pemdi lingkup Aplikasi	16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
					2. Nilai Penerapan Pemdi lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan		
					3. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indikator Reformasi Birokrasi
					4. Nilai Penerapan Pemdi lingkup Infrastruktur		
				Pengembangan aplikasi yang dikelola	Jumlah aplikasi yang dikelola Diskominfo	16.03.2.01 Kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Pemdi sesuai dengan program yang ditentukan		Persentase Perangkat Daerah yang sudah memanfaatkan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	16.03.2.02 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Cakupan leveling Pemerintahan Digital		
					Prosentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah		
				Pelaksanaan PD yang menggunakan WAN dan server yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	16.03.2.02.13 Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
				Pelaksanaan Pengembangan SDM TIK	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	16.03.2.02.19 Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Pelaksanaan pengembangan infrastruktur publik	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	16.03.2.02.24 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Pelaksanaan pengelolaan aplikasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	16.03.2.02.32 Sub Kgiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	



				Pelaksanaan aplikasi yang diintegrasikan pada perangkat daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	16.03.2.02.34 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
				Pelaksanaan kualitas interkoneksi internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	16.03.2.02.36 Sub Kegiatan Penyediaan akses internet	
				Pelaksanaan perencanaan TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	16.03.2.02.37 Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				Pelaksanaan evaluasi TIK di Kota Bandung	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	16.03.2.02.38 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya Kualitas Data Yang Terverifikasi		Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
					Indeks Pembangunan Statistik		Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyusunan data dan survei sebagai bahan informasi		Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	20.02.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	
				Pelaksanaan Survei kepada masyarakat	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	20.02.2.01.0018 Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Pelaksanaan Publikasi Data	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	20.02.2.01.0019 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Pelaksanaan data secara terbuka yang memiliki standar	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	20.02.2.01.0020 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	20.02.2.01.0023 Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	
			Meningkatnya Keamanan Informasi di seluruh Perangkat Daerah		Nilai Penerapan SPBE Lingkup Persandian	21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	



			Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan keamanan informasi pada perangkat daerah		Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	21.02.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	21.02.2.01.0009 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Pelaksanaan audit aplikasi pada perangkat daerah	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	21.02.2.01.0010 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Sebelum Perubahan

Bidang urusan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator outcome dan Output	Baseline (2024)											Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN KOMINFO													
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	95.81	95.91	24.915.764.527	95.92	25.361.079.328	95.93	25.818.344.184	95.94	28.400.178.603	95.95	31.240.196.463	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	24.915.764.527	100%	25.361.079.328	100%	25.818.344.184	100%	26.288.043.362	100%	26.738.293.630	
	Nilai Sakip PD	A	A		A		A		A		A		



Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100.000.000	100%	101.790.000	100%	103.612.041	100%	105.466.697	100%	107.354.550	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	101.790.000	1 dokumen	103.612.041	1 dokumen	105.466.697	1 dokumen	107.354.550	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100%	100%	20.522.187.997	100%	20.889.535.162	100%	21.263.457.842	100%	21.644.073.737	100%	22.031.502.657	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	77 Orang	20.522.187.997	77 Orang	20.889.535.162	77 Orang	21.263.457.842	77 Orang	21.644.073.737	77 Orang	22.031.502.657	
Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepagawaian	100%	100%	108.760.159	100%	110.706.966	100%	112.688.621	100%	114.705.747	100%	116.758.980	



Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	108.760.159	1 Paket	110.706.966	1 Paket	112.688.621	1 Paket	114.705.747	1 Paket	116.758.980	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	100%	100%	830.716.079	100%	845.585.897	100%	860.721.884	100%	876.128.806	100%	891.811.512	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	148.960.900	3 Paket	151.627.300	3 Paket	154.341.429	3 Paket	157.104.140	3 Paket	159.916.304	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	24.416.568	3 Paket	24.853.625	3 Paket	25.298.504	3 Paket	25.751.348	3 Paket	26.212.297	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	22.975.491	2 paket	23.386.752	2 paket	23.805.375	2 paket	24.231.491	2 paket	24.665.235	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 laporan	12 laporan	125.973.120	12 laporan	128.228.039	12 laporan	130.523.321	12 laporan	132.859.688	12 laporan	135.237.877	



Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	246.975.000	12 laporan	251.395.853	12 laporan	255.895.838	12 laporan	260.476.374	12 laporan	265.138.901	
Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	261.415.000	12 laporan	266.094.329	12 laporan	270.857.417	12 laporan	275.705.765	12 laporan	280.640.898	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.145.617.792	100%	2.184.024.350	100%	2.223.118.386	100%	2.262.912.205	100%	2.303.418.334	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	64.470.000	12 laporan	65.624.013	12 laporan	66.798.683	12 laporan	67.994.379	12 laporan	69.211.479	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	12 laporan	12 laporan	2.081.147.792	12 laporan	2.118.400.337	12 laporan	2.156.319.704	12 laporan	2.194.917.826	12 laporan	2.234.206.855	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.208.482.500	100%	1.229.436.953	100%	1.254.745.410	100%	1.284.756.170	100%	1.287.447.598	



Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	30 Unit	30 Unit	912.216.500	30 Unit	928.545.175	30 Unit	945.166.134	30 Unit	962.084.608	30 Unit	979.305.922	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan unit perbaikan peralatan kantor	12 laporan	12 laporan	96.266.000	12 laporan	97.989.161	12 laporan	99.743.167	12 laporan	#####	12 laporan	#####	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	202.902.616	1 Unit	209.836.109	1 Unit	221.142.992	1 Unit	204.795.744	
Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	4,59	4,65	11.214.081.901	4,68	11.414.813.967	4,71	11.619.139.137	4,72	11.827.121.728	4,74	12.038.827.207	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	3.0	3.0	4.491.541.300	3.0	4.571.939.889	3.0	4.653.777.613	3.0	4.737.080.233	3.0	4.821.873.969	
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4	4		4		4		5		5		



	Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0.4	0.4	862.022.100	0.4	877.452.296	0.4	893.158.692	0.4	909.146.232	0.4	925.419.950	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88.51	88.60		88.70		88.80		88.90		88.90		
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	91%	93%	5.353.563.400	94%	5.449.392.185	95%	5.546.936.305	96%	5.646.226.465	96%	5.747.293.919	
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	4 Laporan	1.800.000.000	4 Laporan	1.832.220.000	4 Laporan	1.865.016.738	4 Laporan	1.898.400.538	4 Laporan	1.932.381.907	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas	146.608.000	1 Komunitas	149.232.283	1 Komunitas	151.903.541	1 Komunitas	154.622.614	1 Komunitas	157.390.359	



Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 permohonan	5 permohonan	843.000.000	5 permohonan	858.089.700	5 permohonan	873.449.506	5 permohonan	889.084.252	5 permohonan	904.998.860	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	524.000.000	3 Rekomendasi	533.379.600	3 Rekomendasi	542.927.095	3 Rekomendasi	552.645.490	3 Rekomendasi	562.537.844	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 media	1 media	862.022.100	1 media	877.452.296	1 media	893.158.692	1 media	909.146.232	1 media	925.419.950	
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	NA	10 dokumen	1.086.000.000	10 dokumen	1.105.439.400	10 dokumen	1.125.226.765	10 dokumen	1.145.368.324	10 dokumen	1.165.870.417	
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	NA	12 konten	61.200.000	12 konten	62.295.480	12 konten	63.410.569	12 konten	64.545.618	12 konten	65.700.985	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	NA	300 orang	30.733.300	300 orang	31.283.426	300 orang	31.843.399	300 orang	32.413.396	300 orang	32.993.596	



Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	45.45	10.00	1.045.232.300	10.00	1.063.941.958	10.00	1.082.986.519	10.30	1.102.371.978	10.30	1.122.104.436	
	Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Eveluasi dan Pengembangan	31.50	16.20	751.525.400	16.20	764.977.705	16.20	778.670.806	16.20	792.609.013	16.20	806.796.714	
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	3		3		3		4		4		
	Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	7.40	10.00	3.078.060.801	10.00	3.133.158.089	10.00	3.189.241.619	10.00	3.246.329.044	10.00	3.304.438.334	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	90 Aplikasi	114 Aplikasi	5.074.818.501	118 Aplikasi	5.165.657.752	122 Aplikasi	5.258.123.026	126 Aplikasi	5.352.243.428	130 Aplikasi	5.448.048.585	



	Cakupan leveling Pemerintahan Digital	-	2		3		4		5		5		
	Prosentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35 Aplikasi	35 Aplikasi	700.900.000	35 Aplikasi	713.446.110	35 Aplikasi	726.216.795	35 Aplikasi	739.216.076	35 Aplikasi	752.448.044	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	1 dokumen	251.525.400	1 dokumen	256.027.705	1 dokumen	260.610.601	1 dokumen	265.275.530	1 dokumen	270.023.962	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	200 PD	200 PD	502.160.801	200 PD	511.149.479	200 PD	520.299.055	200 PD	529.612.408	200 PD	539.092.470	



Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	5 Aplikasi	5 Aplikasi	837.513.300	5 Aplikasi	852.504.788	5 Aplikasi	867.764.624	5 Aplikasi	883.297.611	5 Aplikasi	899.108.638	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 aplikasi	4 aplikasi	207.719.000	4 aplikasi	211.437.170	4 aplikasi	215.221.895	4 aplikasi	219.074.367	4 aplikasi	222.995.799	
Penyediaan akses internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	200 PD	200 PD	1.875.000.000	200 PD	1.908.562.500	200 PD	1.942.725.769	200 PD	1.977.500.560	200 PD	2.012.897.820	
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	203.580.000	2 Dokumen	207.224.082	2 Dokumen	210.933.393	2 Dokumen	214.709.101	



Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	305.370.000	2 Dokumen	310.836.123	2 Dokumen	316.400.090	2 Dokumen	322.063.651	
URUSAN STATISTIK													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	4.50	5.80	650.000.000	5.80	661.635.000	5.80	673.478.267	5.80	685.533.527	5.80	697.804.578	
	Indeks Pembangunan Statistik	3,04	3,05		3,06		3,07		3,07		3,09		
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	100%	100%	650.000.000	100%	661.635.000	100%	673.478.267	100%	685.533.527	100%	697.804.578	



Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	100%	200.627.600	100%	204.218.834	100%	207.874.351	100%	211.595.302	100%	215.382.858	
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	100%	242.952.300	100%	247.301.146	100%	251.727.837	100%	256.233.765	100%	260.820.349	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	6 Orang	60 Orang	206.420.100	60 Orang	210.115.020	60 Orang	213.876.079	60 Orang	217.704.460	60 Orang	221.601.370	
URUSAN PERSANDIAN													
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Persandian	1.30	3.70	335.700.000	3.70	341.709.030	3.70	347.825.622	3.70	354.051.700	3.70	360.389.226	



Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	7 Aplikasi	7 Aplikasi	335.700.000	7 Aplikasi	341.709.030	7 Aplikasi	347.825.622	7 Aplikasi	354.051.700	7 Aplikasi	360.389.226	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	NA	7 Aplikasi	335.700.000	7 Aplikasi	341.709.030	7 Aplikasi	347.825.622	7 Aplikasi	354.051.700	7 Aplikasi	360.389.226	
JUMLAH				36.129.846.428		36.775.893.295		37.437.483.321		38.115.165.089		38.777.120.837	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

	: Indikator Kinerja Utama
	: Indikator Reformasi Birokrasi General



Tabel 4.4
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Setelah Perubahan

Bidang urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome dan Output	Baseline (2025)											Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN KOMINFO													
Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Lnngkup Kewenangan Diskominfo	NA	1,87	10.338.081.901	2,0	10.723.133.567	2,3	10.915.077.658	2,4	11.110.457.548	2,5	11.309.334.738	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Aplikasi	NA	1,70	1.045.232.300	2,00	1.063.941.958	2,33	1.082.986.519	2,33	1.102.371.978	2,67	1.122.104.436	
	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Perencanaan, Eveluasi dan Pengembangan	NA	2,00	751.525.400	2,00	764.977.705	2,00	778.670.806	2,67	792.609.013	2,67	806.796.714	



	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital	3	3		3		3		4		4		
	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Infrastruktur	NA	1,70	3.078.060.801	2,00	3.133.158.089	3,00	3.189.241.619	3,00	3.246.329.044	3,00	3.304.438.334	
Kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola Diskominfo	NA	NA	NA	5	852.504.788	5	867.764.624	5	883.297.611	5	899.108.638	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	NA	NA	NA	5 Aplikasi	852.504.788	5 Aplikasi	867.764.624	5 Aplikasi	883.297.611	5 Aplikasi	899.108.638	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang sudah memanfaatkan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP))	93%	94%	1.045.232.300	95%	211.437.170	96%	215.221.895	97%%	219.074.367	98%	222.995.799	
	Cakupan leveling Pemerintahan Digital	1	2	751.525.400	2,2	764.977.705	2,5	778.670.806	2,7	792.609.013	3	806.796.714	



	Prosentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	1,64	1,64	3.078.060.801	1,64	3.133.158.089	1,64	3.189.241.619	1,64	3.246.329.044	1,64	3.304.438.334	
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35 Aplikasi	35 Aplikasi	700.900.000	NA		NA	-	NA	-	NA	-	
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	NA	NA		35 Aplikasi	713.446.110	35 Aplikasi	726.216.795	35 Aplikasi	739.216.076	35 Aplikasi	752.448.044	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	1 dokumen	251.525.400	NA		NA	-	NA	-	NA	-	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	NA	NA		1 dokumen	256.027.705	1 dokumen	260.610.601	1 dokumen	265.275.530	1 dokumen	270.023.962	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	200 PD	200 PD	502.160.801	NA		NA	-	NA	-	NA	-	



Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	NA	NA		1 PD	511.149.479	1 PD	520.299.055	1 PD	529.612.408	1 PD	539.092.470	
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	5 Aplikasi	5 Aplikasi	837.513.300	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 aplikasi	4 aplikasi	207.719.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	NA	NA	NA	4 aplikasi	211.437.170	4 aplikasi	215.221.895	4 aplikasi	219.074.367	4 aplikasi	222.995.799	
Penyediaan akses internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	200 PD	200 PD	1.875.000.000	200 PD	NA	200 PD	NA	200 PD	NA	200 PD	NA	
Penyediaan akses internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	1.908.562.500	1 Perangkat Daerah	1.942.725.769	1 Perangkat Daerah	1.977.500.560	1 Perangkat Daerah	2.012.897.820	



Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	
Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	NA	NA		2 Dokumen	203.580.000	2 Dokumen	207.224.082	2 Dokumen	210.933.393	2 Dokumen	214.709.101	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	305.370.000	2 Dokumen	310.836.123	2 Dokumen	316.400.090	2 Dokumen	322.063.651	
URUSAN STATISTIK													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	61,83	63	650.000.000	68	761.635.000	70,2	775.268.267	75	789.145.568	76	803.271.274	
	Indeks Pembangunan Statistik	3,04	3,05		3,05		3,06		3,06		3,07		
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	100%	100%	650.000.000	100%	761.635.000	100%	775.268.267	100%	789.145.568	100%	803.271.274	



Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	100%	200.627.600	100%	204.218.834	100%	207.874.351	100%	211.595.302	100%	215.382.858	
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	100%	242.952.300	100%	247.301.146	100%	251.727.837	100%	256.233.765	100%	260.820.349	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	6 Orang	60 Orang	206.420.100	60 Orang	210.115.020	60 Orang	213.876.079	60 Orang	217.704.460	60 Orang	221.601.370	
Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	NA	NA	NA	18%	100.000.000	19%	101.790.000	20%	103.612.041	21%	105.466.697	
URUSAN PERSANDIAN													
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Penerapan Pemerintah Digital Lingkup Persandian	NA	2,00	335.700.000	2,00	441.709.030	2,25	449.615.622	2,25	457.663.741,3	2,25	465.855.922,2	
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	7 Aplikasi	7 Aplikasi	335.700.000	7 Aplikasi	441.709.030	7 Aplikasi	449.615.622	7 Aplikasi	457.663.741	7 Aplikasi	465.855.922	



Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	NA	NA	NA	1	100.000.000	1	101.790.000	1	103.612.041	1	105.466.697	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	NA	7 Aplikasi	335.700.000	7 Aplikasi	341.709.030	7 Aplikasi	347.825.622	7 Aplikasi	354.051.700	7 Aplikasi	360.389.226	
URUSAN KOMINFO													
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Layanan Informasi	NA	1,90	3.615.541.300	1,90	3.680.259.489	2,00	3.746.136.134	2,00	3.813.191.971	2,33	3.881.448.107	
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4	4		4		4		5		5		
	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup layanan informasi masyarakat melalui Radio Sonata	NA	1,90	862.022.100	1,90	877.452.296	2,00	893.158.692	2,00	909.146.232	2,33	925.419.950	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88.51	88.60		88.70		88.80		88.90		88.90		



Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	91%	93%	4.477.563.400	94%	4.557.711.785	95%	4.639.294.826	96%	4.722.338.203	96%	4.806.868.057	
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	NA	4 Laporan	1.800.000.000	4 Laporan	1.832.220.000	4 Laporan	1.865.016.738	4 Laporan	1.898.400.538	4 Laporan	1.932.381.907	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas	146.608.000	1 Komunitas		1 Komunitas	-	1 Komunitas	-	1 Komunitas	-	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas		1 Komunitas	149.232.283	1 Komunitas	151.903.541	1 Komunitas	154.622.614	1 Komunitas	157.390.359	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	NA	5 permohonan	843.000.000	5 permohonan		5 permohonan	-	5 permohonan	-	5 permohonan	-	
Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	NA	NA		100%	858.089.700	100%	873.449.506	100%	889.084.252	100%	904.998.860	



Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	NA	3 Rekomendasi	524.000.000	3 Rekomendasi	533.379.600	3 Rekomendasi	542.927.095	3 Rekomendasi	552.645.490	3 Rekomendasi	562.537.844	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 media	1 media	862.022.100	NA		NA	-	NA	-	NA	-	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	NA	NA	NA	250.000	877.452.296	251.000	893.158.692	252.000	909.146.232	253.000	925.419.950	
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	NA	10 dokumen	210.000.000	NA		NA	-	NA	-	NA	-	
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	NA	NA	NA	10 dokumen	213.759.000	10 dokumen	217.585.286	10 dokumen	221.480.063	10 dokumen	225.444.556	
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	NA	12 konten	61.200.000	12 konten	62.295.480	12 konten	63.410.569	12 konten	64.545.618	12 konten	65.700.985	



Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	NA	50 orang	30.733.300	50 orang	31.283.426	50 orang	31.843.399	50 orang	32.413.396	50 orang	32.993.596	
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	95.81	95.91	25.791.764.528	95.92	26.052.759.728	95.93	26.522.405.664	95.94	29.174.646.230	95.95	32.092.110.853	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	25.791.764.528	100%	26.052.759.728	100%	26.522.405.664	100%	27.004.707.542	100%	27.467.786.099	
Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100.000.000	100%	101.790.000	100%	103.612.041	100%	105.466.697	100%	107.354.550	
	Nilai Sakip PD	84,60	84,70		84,80		84,90		85,00		85,10		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	101.790.000	1 dokumen	103.612.041	1 dokumen	105.466.697	1 dokumen	107.354.550	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	100%	20.433.709.076,90	100%	20.413.472.468,76	1,00	20.592.873.626,07	1,00	20.775.486.064,08	1,00	20.961.367.264,77	



Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	77 Orang	20.433.709.076,90	77 Orang	20.413.472.468,76	77 Orang	20.592.873.626,07	77 Orang	20.775.486.064,08	77 Orang	21.147.367.264,63	
Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	100%	100%	108.760.159	100%	110.706.966	100%	112.688.621	100%	114.705.747	100%	116.758.980	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	108.760.159	1 Paket	110.706.966	1 Paket	112.688.621	1 Paket	114.705.747	1 Paket	116.758.980	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	830.716.079	100%	1.031.585.897	100%	1.236.051.284	100%	1.444.176.602	100%	1.656.027.364	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	148.960.900	3 Paket	337.627.300	3 Paket	529.670.829	3 Paket	725.151.937	3 Paket	924.132.156	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	24.416.568	3 Paket	24.853.625	3 Paket	25.298.504	3 Paket	25.751.348	3 Paket	26.212.297	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	22.975.491	2 paket	23.386.752	2 paket	23.805.375	2 paket	24.231.491	2 paket	24.665.235	



Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 laporan	12 laporan	125.973.120	12 laporan	128.228.039	12 laporan	130.523.321	12 laporan	132.859.688	12 laporan	135.237.877	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	246.975.000	12 laporan	251.395.853	12 laporan	255.895.838	12 laporan	260.476.374	12 laporan	265.138.901	
Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	261.415.000	12 laporan	266.094.329	12 laporan	270.857.417	12 laporan	275.705.765	12 laporan	280.640.898	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.110.096.713	100%	3.165.767.444	100%	3.222.434.681	100%	3.280.116.262	100%	3.338.830.343	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	64.470.000	12 laporan	65.624.013	12 laporan	66.798.683	12 laporan	67.994.379	12 laporan	69.211.479	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	12 laporan	12 laporan	3.045.626.713	12 laporan	3.100.143.431	12 laporan	3.155.635.999	12 laporan	3.212.121.883	12 laporan	3.269.618.865	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	100%	100%	1.208.482.500	100%	1.229.436.953	100%	1.254.745.410	100%	1.284.756.170	100%	1.287.447.598	



Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	30 Unit	30 Unit	912.216.500	30 Unit	928.545.175	30 Unit	945.166.134	30 Unit	962.084.608	30 Unit	979.305.922	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan unit perbaikan peralatan kantor	12 laporan	12 laporan	96.266.000	12 laporan	97.989.161	12 laporan	99.743.167	12 laporan	101.528.570	12 laporan	103.345.931	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	202.902.616	1 Unit	209.836.109	1 Unit	221.142.992	1 Unit	204.795.744	
JUMLAH				36.129.846.428,90		36.775.893.295,36		37.437.483.321,64		38.115.165.089,85		38.777.120.837,54	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



: Indikator Kinerja Utama

: Indikator Reformasi Birokrasi General



Tabel 4.5
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA AKSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Transformasi digital layanan perkotaan yang terintegrasi berbasis data geospasial	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya SPBE yang terpadu dan efesien	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Transformasi Digital Layanan Perkotaan	
					Optimasi Bandung Command Center (BCC)	
				Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
				Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan		
				Sub Kegiatan Penyediaan akses internet	Pemerataan Wi-Fi Gratis Setiap RW (RW-Net)	Masih tentatif
				Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis,		



				serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		
2		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Melalui Media	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		
				Sub Kegiatan Relasi Media		
				Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		
				Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Optimasi Sonata FM	
				Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		
				Sub Kegiatan Penyusunan Konten		
				Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		
3		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Data Yang Terverifikasi	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
				Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		
				Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral		
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
4		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Informasi di seluruh Perangkat Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		



				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		
--	--	--	--	---	--	--

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Diskominfo Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 - 2029, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Diskominfo Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Diskominfo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Bandung yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo, menggunakan Norma, Standar Prosedur dan Kaidah (NSPK) yang semula menggunakan Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekarang menggunakan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi), dan Indeks Kepuasan Masyarakat PD berdasarkan Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, seperti yang tergambar pada table berikut :



Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030
Sebelum Perubahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	Nilai	4,62	4,65	4,68	4,71	4,72	4,74
2	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Nilai	95,90	95,91	95,92	95,93	95,94	95,95

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 4.7
INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030
Setelah Perubahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Lingkup Kewenangan Diskominfo	Nilai	NA	1,87	2,0	2,3	2,4	2,5
2	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Nilai	96,05	96,06	96,07	96,08	96,09	96,10

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Sejalan dengan aspek dan indikator kinerja Utama menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Program-program yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci perusan dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut;

Tabel 4.8
IKATOR KINERJA KUNCI
Sebelum Perubahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	URUSAN KOMINFO								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	7,14%	100%	100%	100%	100%	100%	2025 untuk internet opd belum dianggarkan, dan rencana akan dianggarkan ditahun 2026
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	30%	100%	100%	100%	100%	100%	jip opd untuk tahun 2025 belum dianggarkan dan rencana akan dianggarkan ditahun 2026. untuk target jip 2025 ditempuh dengan upaya penarikan fo opd ke odc diskominfo



3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persentase	90%	95%	100%	100%	100%	100%	Pemanfaatan layanan SPLP di Kota Bandung baru dimulai tahun 2023, maka data 2022 dianggap 0
	URUSAN STATISTIK								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3.025	3,05	3,06	3,07	3,08	3,09	
	URUSAN PERSANDIAN								
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	Persentase	67	69	72	75	77	80	Indeks KAMI versi 5.0 baru diberlakukan tahun 2025, akan tetapi pada tahun 2024 sempat dilakukan verifikasi oleh BSSN.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 4.9
IKATOR KINERJA KUNCI
Setelah Perubahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					RUMUS
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	URUSAN KOMINFO									
1	Persentase Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;	%	13,09%	7,14%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	<i>Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh <u>Dinas Kominfo</u></i> <i>Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah x 100%</i>
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi ;	%	20,00%	36%	52%	68%	84%	100%	100%	<i>Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan <u>secara online dan terintegrasi</u></i> <i>Jumlah layanan publik x 100%</i>
3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	%	NA	NA	10%	10%	10%	10%	10%	<i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaan penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah <u>kabupaten/kota</u></i> <i>Jumlah penduduk x 100%</i>



	URUSAN STATISTIK									
1	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah.	%	NA	NA	50%	54%	56%	65	70%	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data <u>berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah</u> Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah X 100%
	URUSAN PERSANDIAN									
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	64	64	67	70	72	74	77	<u>Nilai indeks Keamanan Informasi [KAMI] hasil verifikasi</u> Nilai optimal indeks Keamanan Informasi(KAMI) (918)

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan komunikasi publik, informatika, persandian, statistik sektoral, serta percepatan transformasi digital pemerintahan.

Perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berkualitas menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus beradaptasi dan melakukan inovasi. Oleh karena itu, pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan ini diarahkan tidak hanya pada pencapaian target administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola, efektivitas layanan, integrasi sistem dan data, keamanan informasi, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam periode 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan sumber daya, maupun pencapaian indikator kinerja. Peningkatan kinerja tersebut perlu didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, penyederhanaan proses bisnis, penguatan koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah, serta penerapan pengelolaan data dan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transformasi menuju Pemerintah Digital diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung. Pengembangan teknologi dan sistem digital harus diarahkan pada keterpaduan layanan, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, peningkatan keamanan informasi, serta penyediaan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata diukur dari jumlah aplikasi atau sistem yang dibangun, tetapi dari sejauh mana teknologi mampu meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kami berharap pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan ini dapat mendorong terwujudnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang semakin profesional, responsif, inovatif, adaptif, dan berkinerja tinggi. Setiap program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta dampak. Evaluasi kinerja secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap target yang telah ditetapkan dapat dicapai sekaligus menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pada periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan ini membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika serta dukungan dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi, kebutuhan peningkatan kualitas layanan, keamanan informasi, kesenjangan kapasitas digital, serta tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan telah tersusunnya renstra ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung harus segera melakukan, yaitu;

1. Peningkatan standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya; Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK yang terintegrasi;

2. Peningkatan pelayanan informasi melalui open data; Mendorong tim pengembangan smart city untuk lebih aktif dan Peningkatan layanan open data;
3. Peningkatan dan perkuat keamanan server yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung;
4. Peningkatan kecepatan layanan internet atau bandwidth ke perangkat daerah.

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung juga dalam pelayanan kepada masyarakat harus memberikan;

- 1 Peningkatan penyebaran interkoneksi dan wifi fasos/fasum; Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan;
- 2 Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya;
- 3 Pemanfaatan layanan pengaduan Online LAPOR;
- 4 Pemanfaatan BCC sebagai kebijakan pimpinan, karena Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kota Bandung dengan senantiasa menyediakan sarana dan prasarana informatika yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai dinas yang menjalin komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Pada akhirnya, kami berharap Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025–2029 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kota Bandung. Dengan semangat perubahan, inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menghadirkan tata

kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi, transparan, akuntabel, aman, efektif, dan berorientasi pada masyarakat.

Semoga seluruh target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan ini dapat diwujudkan dengan penuh tanggung jawab dan konsistensi, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kota Bandung yang semakin maju, inovatif, inklusif, dan berdaya saing.

Bandung, 13 Agustus 2025

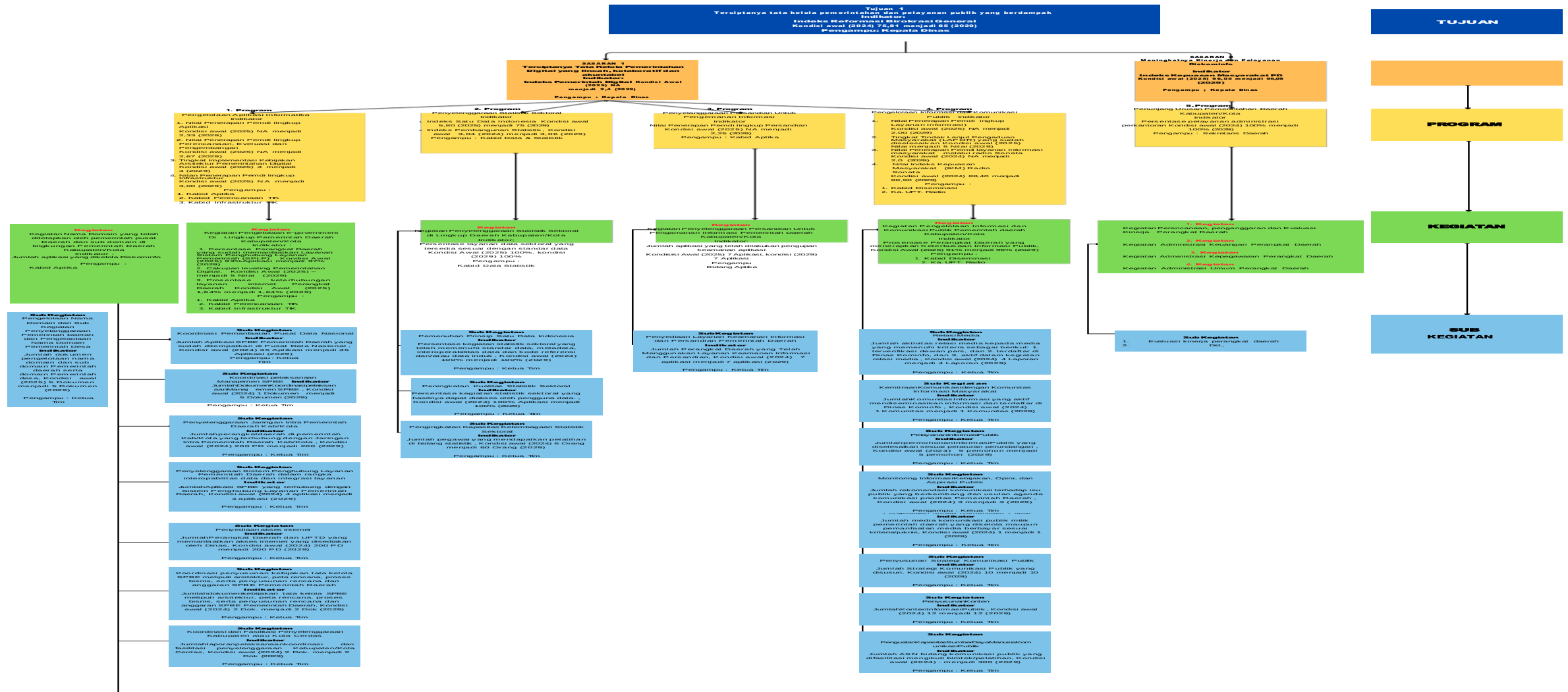
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung



Henryco Arie Sapiie, SE.AK
Nip. 197106211998061001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Cascading 2025 - 2029 Pelaksanaan Program Diskominfo Kota Bandung





CROSSCUTTING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

